



BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

**#bangga
melayani
bangsa**



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

Jalan P. Diponegoro No. 21, Kel. Langkai, Kec. Pahandut,
Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Website: www.pn-palangkaraya.go.id
Email: surat@pn-palangkaraya.go.id



<https://pn-palangkaraya.go.id>



Pengadilan Negeri Palangkaraya



[pnpalangkaraya](https://twitter.com/pnpalangkaraya)



[PN Palangka Raya](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Kata Pengantar



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Shalom...Om Swastiastu...Namo Budaya

Salam Kebajikan untuk kita semua

Adil Katalino, Bacuramin Ka'Saruga, Basengat Ka'Jubata.

(Baik Pada Sesama Manusia, berpandangan hidup seperti perkataan baik di surga, kehidupan manusia bergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa).

Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024. Laporan ini disusun berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4506/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berperan aktif dalam penyelesaian laporan ini, namun demi kesempurnaan laporan ini, kami juga mengharapkan masukan-masukan yang konstruktif, agar ke depannya lebih baik lagi.



Palangka Raya, 14 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya,

Ricky Fardinand, S.H., M.H

PROFIL PIMPINAN

KETUA



WAKIL KETUA



PANITERA



SEKRETARIS



PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA TAHUN 2024



Piagam Penghargaan dari Ketua Mahkamah Agung dalam Anugerah Mahkamah Agung RI 2024 (Peringkat I Penerima Anugerah Sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Survei Kepuasan Masyarakat Kategori Pengadilan Negeri Dengan Beban Perkara 501-1000);



Piagam Penghargaan dari Ketua Mahkamah Agung dalam Anugerah Mahkamah Agung RI 2024 (Peringkat I Penerima Anugerah Sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Kategori Pengadilan Negeri Dengan Beban Perkara 501-1000);

	Piagam Penghargaan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Piala Abhinaya Upangga Wisesa 2024) sebagai Peringkat III Penilaian Administrasi dan Keuangan Perkara Pada Pengadilan Negeri Kelas IA.
	Juara ke-I penilaian keberhasilan pelaksanaan pendekatan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana se-wilayah Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2024
	Juara ke-II penilaian capaian kinerja satuan kerja terbaik se-wilayah Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PROFIL PIMPINAN	ii
PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA TAHUN 2024	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
BAB II KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN AKREDITASI PENJAMINAN	
MUTU.....	5
A. Keadaan Perkara	5
B. Penyelesaian Perkara	17
- Jumlah sisa perkara yang diputus	17
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	18
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	18
- Jumlah perkara perdata yang berhasil mediasi	19
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui Diversi	19
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	20
- Pos Bakum (Satker yang mendapat alokasi dan Realisasi Anggaran)	20
- Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu.....	21
- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	22
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA.....	23
A. Mutasi	28
B. Promosi	28
C. Pensiun	29
D. Diklat	29
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI	
INFORMASI	35
A. Pengelolaan Keuangan	35

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	37
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	49
D. Implementasi e-court di lingkungan Pengadilan Negeri Palangka Raya	51
E. Implementasi SIPP dilingkungan Pengadilan Negeri Palangka Raya.....	52
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	54
A. Akreditasi Penjaminan Mutu.....	54
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	56
C. Inovasi Pelayanan Publik	58
BAB VI PENGAWASAN	78
A. Internal.....	78
B. Evaluasi.....	82
BAB VII PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Rekomendasi	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, mempunyai tugas pokok memeriksa, memutus, dan mengadili perkara, serta dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintahan lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Palangkaraya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) **Fungsi Mengadili [*judicial power*]**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
- b) **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, serta seluruh Pegawai pada Pengadilan Negeri Palangkaraya.
- c) **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- d) **Fungsi Lainnya :**
 - a. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991)
 - b. Pelayanan pelaksanaan registrasi kuasa insidentill yang akan beracara di Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Palangkaraya telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan saling mendukung satu sama lain yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab dan kebersamaan oleh seluruh bagian yang terkait, baik dari Aparatur Teknis Yudisial maupun Non Teknis Yudisial yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Palangkaraya. Sehingga apa yang menjadi Visi dan Misi Pengadilan Negeri Palangkaraya dapat terwujud sesuai dengan yang dicita-citakan.

B. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Negeri Palangkaraya mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu sebagai berikut : "Terwujudnya Pengadilan Negeri / Tipikor / Hubungan Industrial Palangkaraya Kelas I A Yang Agung". Sedangkan Misi Pengadilan Negeri Palangkaraya adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Palangkaraya;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Palangkaraya;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Palangkaraya.

C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palangkaraya merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Palangkaraya diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai Visi dan Misi serta tujuan organisasi pada tahun selanjutnya.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Palangkaraya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sedangkan Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Palangkaraya, adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Peradilan.

Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Palangkaraya mencanangkan beberapa program. Adapun program tersebut adalah sebagai berikut:

1) Program Dukungan Manajemen

Pada tahun 2024 kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini yaitu:

- a. **Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung**, berupa:
 1. Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi;
 - Scanner sebanyak 4 unit.
 2. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran;
 - Rak arsip berkas perkara sebanyak 5 unit;
 - Layar monitor 65 inch.
- b. **Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama** yang terdiri dari:

- Layanan Perkantoran seperti Gaji dan Tunjangan;
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam pelaksanaan program ini yaitu Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang terdiri dari:

- a. Koordinasi.
 - Kimwasmat
- b. Perkara Hukum Perseorangan:
 - Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di Wilayah Tengah;
 - Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di tingkat pertama di Wilayah Tengah;
 - Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan di tingkat pertama di Wilayah Tengah;
- c. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan berupa :
 - Layanan Pos Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Umum.

BAB II

KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

A. KEADAAN PERKARA

Matrik keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Perkara	Sisa Perkara Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara Putus	Sisa Perkara
Pidana Biasa	44	381	364	61
Pidana Singkat	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	20	20	0
Pidana Anak	0	19	19	0
Pidana Pra Peradilan	0	13	13	0
Perkara Lalu Lintas	0	2633	2633	0
Perdata Gugatan	53	227	196	81
Perdata Permohonan	7	103	107	3
Perdata Gugatan Sederhana	0	30	28	2
PHI	13	11	23	1
Perlawanan/ Bantahan	0	2	2	0
TIPIKOR	11	60	47	24

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2024

Matrik keadaan perkara pidana biasa pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Sisa Bulan Lalu Yang Belum Diminutasi	Masuk	Beban Bulan Ini	Putus
1	Januari	44	21	65	22
2	Februari	40	18	58	17
3	Maret	39	37	76	23
4	April	55	36	91	13
5	Mei	77	39	116	35
6	Juni	82	29	111	38
7	Juli	74	40	114	49
8	Agustus	65	35	100	29
9	September	73	33	106	30
10	Oktober	73	29	102	34
11	November	69	38	107	21
12	Desember	83	26	109	53
Total			381		364

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN *TAHUN 2024*

Matrik keadaan perkara pidana biasa berdasarkan klasifikasi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Klasifikasi	Masuk
1	Narkotika	137
2	Pencurian	62
3	Lain-lain	35
4	Penggelapan	27
5	ITE	24
6	Perlindungan Anak	20
7	Penipuan	13
8	Penganiayaan	8
9	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan(Mineral,Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi	8
10	Kesehatan	7
11	Kejahatan Perjudian	7
12	Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan	6
13	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	6
14	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	5
15	Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat	2
16	Kejahatan terhadap Kesusilaan	2
17	Lingkungan	2
18	Penebangan Kayu	2
19	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	2
20	Kebakaran Hutan	1
21	Pengancaman	1
22	Pembunuhan	1
23	Pemalsuan Surat	1
24	Lalu-lintas	1
25	Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajak	1
Total		381

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2024

Matrik keadaan perkara pidana cepat berdasarkan klasifikasi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Sisa Bulan Lalu Yang Belum Diminutasi	Masuk	Putus
1	Januari	0	0	0
2	Februari	0	0	0
3	Maret	0	0	0
4	April	0	0	0
5	Mei	0	1	1
6	Juni	0	17	17
7	Juli	0	1	1
8	Agustus	0	1	1
9	September	0	0	0
10	Oktober	0	0	0
11	November	0	0	0
12	Desember	0	0	0
Total			20	20

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN *TAHUN 2024*

Matrik keadaan perkara pidana anak berdasarkan klasifikasi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Sisa Bulan Lalu Yang Belum Diminutasi	Masuk	Putus
1	Januari	2	0	1
2	Februari	1	3	0
3	Maret	4	0	2
4	April	4	0	0
5	Mei	2	1	2
6	Juni	1	0	0
7	Juli	1	0	0
8	Agustus	1	3	1
9	September	4	2	3
10	Oktober	3	8	2
11	November	8	0	4
12	Desember	4	2	4
Total			19	19

Matrik keadaan perkara pidana anak berdasarkan klasifikasi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Klasifikasi	Masuk
1	Pencurian	12
2	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	1
3	Narkotika	1
4	Perlindungan Anak	2
5	Lain-lain	1
6	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang	1
7	Pembunuhan	1
Total		19

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2024

Matrik keadaan perkara pidana praperadilan berdasarkan klasifikasi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Sisa Bulan Lalu Yang Belum Diminutasi	Masuk	Putus
1	Januari	0	2	0
2	Februari	2	0	2
3	Maret	0	2	0
4	April	2	0	1
5	Mei	1	1	2
6	Juni	1	0	0
7	Juli	0	5	0
8	Agustus	5	2	5
9	September	2	1	2
10	Oktober	1	0	1
11	November	0	0	0
12	Desember	0	0	0
Total			13	13

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2024

Matrik keadaan perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Sisa Bulan Lalu Yang Belum Diminutasi	Masuk	Putus
1	Januari	11	1	1
2	Februari	11	9	4
3	Maret	17	8	1
4	April	23	4	6
5	Mei	21	6	4
6	Juni	23	1	3
7	Juli	21	3	9
8	Agustus	16	3	5
9	September	13	6	6
10	Oktober	14	3	2
11	November	14	9	0
12	Desember	23	7	6
Total			60	47

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2024

Matrik keadaan perkara perdata gugatan pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Sisa Bulan Lalu		Masuk	Jumlah Putus
		Belum Putus	Sudah Putus Belum Minutasi		
1	Januari	53	4	21	18
2	Februari	56	2	18	14
3	Maret	60	2	21	9
4	April	72	2	15	15
5	Mei	72	2	21	15
6	Juni	78	2	19	11
7	Juli	86	1	34	19
8	Agustus	100	1	18	15
9	September	103	0	18	27
10	Oktober	93	3	16	16
11	November	93	2	10	8
12	Desember	95	1	17	29
Total				227	196

Matrik keadaan perkara perdata gugatan berdasarkan klasifikasi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Klasifikasi	Masuk
1	Perceraian	97
2	Perbuatan Melawan Hukum	61
3	Wanprestasi	29
4	Jual Beli Tanah	24
5	Penyerobotan	4
6	Lain-lain	4
7	Harta Bersama	3
8	Objek Sengketa Tanah	2
9	Sertifikat/Girik	1
10	Warisan/Wasiat	1
11	Ganti Rugi	1
12	Jual Beli	1
Total		227

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2024

Matrik keadaan perkara perdata permohonan pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Sisa Bulan Lalu		Masuk	Jumlah Putus
		Belum Putus	Sudah Putus Belum Minutasi		
1	Januari	7	0	9	13
2	Februari	3	1	7	6
3	Maret	5	0	2	5
4	April	2	0	9	6
5	Mei	5	0	9	9
6	Juni	5	0	9	8
7	Juli	6	0	16	12
8	Agustus	10	0	11	13
9	September	8	1	8	10
10	Oktober	7	0	11	9
11	November	9	2	3	11
12	Desember	3	1	9	10
Total				103	107

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2024

Matrik keadaan perkara perdata gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Periode	Jumlah Perkara	
		Diterima	Diputus
1	Januari	-	-
2	Februari	-	-
3	Maret	2	-
4	April	7	-
5	Mei	3	8
6	Juni	2	2
7	Juli	1	2
8	Agustus	7	4
9	September	4	6
10	Oktober	-	3
11	November	3	1
12	Desember	1	2
TOTAL		30	28

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2024

Matrik keadaan perkara perselisihan hubungan industrial Pengadilan Negeri Palangkaraya pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Sisa bulan lalu		Masuk	Jumlah putus
		Belum putus	Sudah putus belum minutasi		
1	Januari	13	1	1	3
2	Februari	12	0	1	9
3	Maret	4	3	0	5
4	April	2	0	0	0
5	Mei	2	0	1	0
6	Juni	3	0	2	1
7	Juli	4	0	4	1
8	Agustus	7	0	1	0
9	September	8	0	0	2
10	Oktober	6	0	0	3
11	November	3	1	0	3
12	Desember	1	0	1	1
TOTAL				11	23

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2024

Matrik pelaksanaan eksekusi perkara Perdata maupun Perdata Khusus Pengadilan Negeri Palangkaraya pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Periode	Jumlah Permohonan Bulan Itu	Pelaksanaan Eksekusi Bulan itu (Termasuk Aanmaning)
1	Januari	1	3
2	Februari	3	1
3	Maret	2	3
4	April	-	1
5	Mei	-	3
6	Juni	3	1
7	Juli	6	10
8	Agustus	4	6
9	September	1	2
10	Oktober	2	-
11	November	4	6
12	Desember	1	-
TOTAL		27	36

Data di atas menunjukkan Jumlah permohonan eksekusi baik perdata maupun PHI pada tahun 2024 sebanyak **27** permohonan dan segala eksekusi yang dilaksanakan pada tahun 2024 termasuk yang telah dimohonkan ditahun-tahun sebelumnya sejumlah **36** pelaksanaan.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN *TAHUN 2024*

Matrik keadaan perkara yang mengajukan upaya hukum pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Perkara	Banding	Kasasi	Mengajukan PK
Pidana Biasa	14	14	3
Pidana Anak	1	-	-
Perdata Gugatan	27	10	8
Perdata Permohonan	-	1	-
PHI	-	19	-
TIPIKOR	19	15	9
Total	61	59	20

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jumlah sisa perkara yang diputus pada tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Palangkaraya adalah sebagai berikut:

Perkara	Jumlah sisa perkara tahun lalu	Jumlah sisa perkara yang diputus
Pidana Biasa	44	44
Pidana Singkat	0	0
Pidana Cepat	0	0
Pidana Anak	0	0
Pidana Pra Peradilan	0	0
Perkara Lalu Lintas	0	0
Perdata Gugatan	53	53
Perdata Permohonan	7	7
Perdata Gugatan Sederhana	0	0
PHI	13	13
Perlawanan/ Bantahan	0	0
TIPIKOR	11	11

2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada Pengadilan Negeri Palangkaraya adalah sebagai berikut:

Perkara	Jumlah perkara putus	Perkara yang diputus tepat waktu
Pidana Biasa	364	364
Pidana Singkat	0	0
Pidana Cepat	20	20
Pidana Anak	19	19
Pidana Pra Peradilan	13	13
Perkara Lalu Lintas	2633	2633
Perdata Gugatan	196	141
Perdata Permohonan	107	107
Perdata Gugatan Sederhana	28	28
PHI	23	23
Perlawanan/Bantahan	2	2
Tipikor	47	46

3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK pada Pengadilan Negeri Palangkaraya adalah sebagai berikut:

Perkara	Yang tidak mengajukan Banding	Yang tidak mengajukan Kasasi	Yang tidak Mengajukan PK
Pidana Biasa	350	350	361
Pidana Anak	18	19	19
Perdata Gugatan	169	186	188
Perdata Permohonan	-	106	-
PHI	-	4	-
Tipikor	28	32	27
Total	565	697	595

4. Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi

Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tahun 2024 adalah sebanyak 7 (tujuh) perkara dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Perkara	Mediator	Hasil Mediasi
1	20/Pdt.G/2024/PN Plk	Muhammad Affan, S.H., M.H.	Berhasil Dengan Pencabutan
2	50/Pdt.G/2024/PN Plk	Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.	Berhasil Dengan Akta Perdamaian
3	63/Pdt.G/2024/PN Plk	Benyamin, S.H.	Berhasil Dengan Pencabutan
4	41/Pdt.G/2024/PN Plk	Sumaryono, S.H.,M.H.	Berhasil Dengan Akta Perdamaian
5	170/Pdt.G/2024/PN Plk	Benyamin, S.H.	Berhasil Dengan Akta Perdamaian
6	166/Pdt.G/2024/PN Plk	H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.	Berhasil Dengan Akta Perdamaian
7	207/Pdt.G/2023/PN Plk	Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.	Berhasil Dengan Pencabutan

5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tahun 2024 adalah :

No.	Nomor Perkara	Nama Terdakwa	Majelis Hakim
-	-	-	

6. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorative Justice

Restorative Justice adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini menekankan dialog, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan kerugian korban, dengan tujuan mencapai keadilan yang lebih manusiawi tanpa harus mengedepankan hukuman pidana. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan

restorative Justice pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tahun 2024 adalah sebanyak 5 (lima) perkara dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Pelaksanaan	Nomor Perkara	Klasifikasi
1	Maret	2	1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk	Pidana Anak
			2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk	Pidana Anak
2	November	3	12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk	Pidana Anak
			14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk	Pidana Anak
			16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk	Pidana Anak
Total		5 Perkara		

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

1. Posbakum (satker yang mendapat alokasi dan Realisasi Anggaran)

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 27).

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010, bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara Cuma-Cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Adapun jumlah alokasi dan realisasi anggaran untuk Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Jumlah Alokasi Dana pada tahun 2024	Realisasi Anggaran tahun 2024	% Realisasi Anggaran
Rp. 44.000.000	Rp. 44.000.000	100%

2. Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar Gedung Pengadilan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Pelayanan Terpadu sidang keliling meliputi:

- a. Persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara terkait lainnya oleh Pengadilan Negeri atau itsbat nikah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran;

- b. Pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- c. Pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2024 tidak ada perkara yang menggunakan sidang keliling/ Pelayanan terpadu Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Salah satu bentuk untuk memenuhi pelayanan kepada publik adalah dengan memberi Hak atas biaya perkara cuma-cuma (prodeo) yang didasari oleh SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis.

Pada tahun 2024 pada DIPA Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak ada alokasi anggaran untuk perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Demikian pula dengan SDM yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya yang merupakan salah satu instansi Pelayanan Publik maka kualitas dari Pelayanan amatlah penting, dibutuhkan dukungan SDM berkualitas yang menentukan keberhasilan dalam setiap pelayanan publik. Sumber Daya Manusia dalam hal kuantitas yang mendukung pelaksanaan Kinerja dan Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, yaitu sebagai berikut :

Daftar Hakim dan Pegawai (Per 31 Desember 2024)

NO	N A M A	N I P	JABATAN
1	Ricky Fardinand, S.H., M.Hum.	19720611 199903 1 002	Ketua
2	Muhammad Ramdes, S.H	19671214 199203 1 001	Wakil
3	Benhard M. Lumban Toruan, S.H., M.H.	19720409 200003 1 003	Hakim
4	Benyamin, S.H	19640921 199903 1 001	Hakim
5	Erhammudin, S.H., M.H.	19760502 200212 1 008	Hakim
6	Yudi Eka Putra, S.H., M.H	19741231 200212 1 015	Hakim
7	Sumaryono, S.H., M.H	19770518 200212 1 004	Hakim
8	Sri Hasnawati, S.H., M.Kn	19801219 200312 2 002	Hakim
9	Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.,H	19821114 200704 1 001	Hakim
10	Muhammad Affan, S.H., M.H	19760324 200904 1 004	Hakim
11	Kusmat Tirta Sasmita, S.H	-	Hakim Adhoc Tipikor
12	Muji Kartika Rahayu, S.H., M.Fil.	-	Hakim Adhoc Tipikor
13	Darjono Abadi, S.H., M.H.	-	Hakim Adhoc Tipikor
14	Amir Mahmud Munte, S.H	-	Hakim Adhoc Tipikor
15	Iis Siti Rochmah, S.H., M.H	-	Hakim Adhoc Tipikor
16	Astiti Swanita Rini, S.H.,M.H	-	Hakim Adhoc PHI
17	Dwi Harto Hanggono, S.H	-	Hakim Adhoc PHI
18	Prapti Ramadhani, S.T, S.H., M.H	-	Hakim Adhoc PHI
19	Hj. Sri Widarti, S.Sos., S.H	19670315 199003 2 001	Sekretaris

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2024

20	Mansyah, S.H	19701213 199403 1 001	Panitera	
21	Teguh Budiono, S.H	19820809 200805 1 001	Panitera Perdata	Muda
22	I Gusti Bagus Sandhi, S.H	19840607 200804 1 001	Panitera Pidana	Muda
23	-	-	Panitera Khusus PHI	Muda
24	Efraim, S.H.	19750423 200604 1 001	Panitera Khusus Tipikor	Muda
25	Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H	19710117 199503 1 001	Panitera Hukum	Muda
26	Russianna, S.H.	19690516 199203 2 002	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana	
27	Nova Iraini, S.E., M.Si.	19841102 200904 2 007	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	
28	Marliyani, S.E.	19850721 200904 2 003	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Perencanaan	
29	Gusti Norliani	19650628 199103 2 002	Panitera Pengganti	
30	Rahmawati Fitri, S.H.	19840724 200904 2 011	Panitera Pengganti	
31	Riswan Adiputra, S.H	19860217 200904 1 003	Panitera Pengganti	
32	Taty, S.H	19850216 200604 2 001	Panitera Pengganti	
33	Sari Ramadhaniati, S.H.	19840614 200904 2 011	Panitera Pengganti	
34	Ika Melinda Meliala, S.H.	19871020 201101 2 014	Panitera Pengganti	
35	Jumiati, S.H	19870925 200604 2 002	Panitera Pengganti	
36	Lianova, S.H.	19750302 200912 2 001	Panitera Pengganti	
37	Wajidin	19690525 199303 1 005	Jurusita	
38	Ika Murtianingsih, S.H.	19800410 200604 2 003	Jurusita	
39	Salundik, S.H.	19710705 201408 1 002	Jurusita	
40	Mewikristya, S.Kom	19851107 200904 2 010	Klerek-Penelaah Teknis Kebijakan Sub.Bag.PTIP	
41	Mandes, S.Kom.	19830403 200912 1 004	Operator-Penata Layanan Operasional Sub.Bag.PTIP	

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2024

42	Ainun Zaryah, S.E.	19871216 200904 2 005	Fungsional Pranata Keuangan APBN Penyelia
43	Abdul kahar Mashuri	19721110 199303 1 002	Klerek Administrasi Perkantoran Sub.Bag.Umum dan Keuangan
44	Laila Hayati, A.Md	19841017 200912 2 001	Pengolah Data dan Informasi Sub.Bag.Kepegawaian
45	Kristina Melati Pasaribu, S.H	19950508 202203 2 015	Analisis Perkara Peradilan (Cakim)
46	Jesy Itasari Banjarnahor, S.H	19970612 202203 2 011	Analisis Perkara Peradilan (Cakim)
47	Riri Lastiar Situmorang, S.H	19940405 202203 2 011	Analisis Perkara Peradilan (Cakim)
48	Kevien Dicky Aldison, S.H	19990922 202203 1 003	Analisis Perkara Peradilan (Cakim)
49	Putri Tresia Tampubolon, S.H	19971023 202203 2 011	Analisis Perkara Peradilan (Cakim)
50	Anselmus Vialino Sinaga, S.H	19962023 202203 1 006	Analisis Perkara Peradilan (Cakim)
51	Teresa Vrida Hillary Lumban T, S.H	19970402 202203 2 016	Analisis Perkara Peradilan (Cakim)
52	Bayu nAkbar Wicaksono, S.H	19960221 202203 1 004	Analisis Perkara Peradilan (Cakim)
53	Monica Kristianti Sitompul, S.H	19920627 202203 2 008	Analisis Perkara Peradilan (Cakim)
54	Nanda Mario Fernandos, A.Md	19960801 202012 1 005	Klerek-Pengelola Penanganan Perkara Kepaniteraan Perdata
55	Putri Prayana Tarigan, A.Md	19910911 202203 2 012	Klerek- Pengelola Data dan Informasi Sub.Bag. Umum dan Keuangan

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2024

56	Irmayani Roulina Simanjorang, A.Md	19921205 202203 2 007	Klerek-Pengelola Penanganan Perkara Kepaniteraan Perdata
57	Lukman Adi Ariviano, S.H	19960328 202405 1 001	Klerek-Analis Perkara Peradilan Kepaniteraan Perdata
58	Eventy Velly Palawa, S.H	19960807 202405 2 001	Klerek-Analis Perkara Peradilan Kepaniteraan Pidana
59	Gilang Rahadian Saputra, S.H	20010701 202405 1 001	Klerek-Analis Perkara Peradilan Kepaniteraan Hukum
60	Agave Cristy Januarti Saragih	-	PPNPN
61	Yoyo	-	PPNPN
62	Firdana Priyo Handoko	-	PPNPN
63	Ferry	-	PPNPN
64	Jejen Jaeni	-	PPNPN
65	Timotius Agni Angga Kusuma	-	PPNPN
66	Kaspul	-	PPNPN
67	Dean Barizka	-	PPNPN
68	Gustaf Denovan	-	PPNPN
69	Dandy Kurniawan	-	PPNPN
70	Anggryanto Sulistyo	-	PPNPN
71	Supriyanto	-	PPNPN
72	Riska Paramita	-	PPNPN
73	Berni Matheus Novrianus	-	PPNPN
74	Jimi Ade Candra	-	PPNPN
75	Siti Kifrah Suciana	-	PPNPN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2024

Komposisi SDM Pengadilan Negeri Palangkaraya per 31 Desember 2024 Berdasarkan Kepangkatan/Golongan:

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama	IV/e	-	-	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	3	-	3
4	Pembina Tk. I	IV/b	6	2	8
5	Pembina	IV/a	2	-	2
6	Penata Tk. I	III/d	7	8	15
7	Penata	III/c	5	-	5
8	Penata Muda Tk. I	III/b	2	1	3
9	Penata Muda	III/a	6	7	13
10	Pengatur Tk. I	II/d	-	-	-
11	Pengatur	II/c	1	2	3
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-	-	-
13	Pengatur Muda	II/a	-	-	-
14	Non Pangkat	-	14	2	16

Komposisi SDM Pengadilan Negeri Palangkaraya per 31 Desember 2024 Berdasarkan Pendidikan:

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Doktoral (S-3)	-	-	-
2	Magister (S-2)	8	5	13
3	Sarjana (S-1)	13	26	39
4	Diploma (D-3)	1	3	4
5	SLTA/Sederajat	2	-	2
6	SLTP/Sederajat	-	-	-
7	SD/Sederajat	-	-	-

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2024

M U T A S I

Data Mutasi Pegawai Masuk Tahun 2024:

No.	Nama	Jabatan / Satker Lama	Jabatan / Satker Baru
1.	Sri Hasnawati, S.H., M.Kn	Hakim Yustisial Kelas II PT Pontianak	Hakim PN Palangkaraya
2.	Teguh Budiono, S.H	Panitera Muda Perdata Sampit	Panitera Muda Khusus PHI PN Palangkaraya
3.	Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H	Panitera Muda Pidana PN Kuala Kurun	Panitera Muda Hukum PN Palangkaraya
4.	Mansyah, S.H	Panitera PN Martapura	Panitera PN Palangkaraya
5.	Muhammad Rifa Rizah, S.H	Hakim PN Kediri	Hakim PN Palangkaraya
6.	Ricky Fardinand, S.H.,M.H	Wakil Ketua PN Tanjung Pinang	Ketua PN Palangkaraya

Data Mutasi Pegawai Keluar Tahun 2024:

No.	Nama	Jabatan / Satker Lama	Jabatan / Satker Baru
1.	Erni Kusumawati, S.H., M.H.	Hakim PN Palangkaraya	Hakim PN Yogyakarta
2	Teguh Budiono, S.H	Panitera Muda Khusus PHI Palangkaraya	Panitera Muda Perdata PN Palangkaraya

➤ P R O M O S I

Data Promosi Selama Tahun 2024:

No.	Nama	Jabatan / Satker Lama	Jabatan / Satker Baru
1	Hotma Edison Parindungan Sipahutar, S.H., M.H	Hakim PN Palangkaraya	Wakil Ketua PN Tebo
2	Agung Sulistiyono, S.H., S.Sos., M.Hum	Ketua PN Palangkaraya	Hakim Tinggi PT Banjarmasin
3	Edi Zarqoni, S.H	Panitera Muda Perdata PN Palangkaraya	Panitera PN Muara Teweh

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024

➤ P E N S I U N

Data Hakim dan Pegawai yang Pensiun Selama Tahun 2024:

No.	Nama	Jabatan	TMT
1	Drs. Nur Insan	Hakim Adhoc PHI	19 Agustus 2024
2	Muhammad Suhri Burhan, S.H., M.H	Hakim Adhoc PHI	11 September 2024

➤ DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT) TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Muhammad Affan, S.H., M.H	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Bagi Hakim dilingkungan Peradilan Umum pada Tgl 26 sd 31 Januari 2024 dan Tgl. 1 Februari sd 6 Februari 2024. Satker PN Plk
2.	I Gusti Bagus Sandhi, S.H	Panmud Pidana	Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan kota tanggap narkoba Tgl 5 Maret 2024 tempat Palangkaraya
3.	Semua Hakim, Hakim adhoc PHI dan Hakim Adhoc Tipikor	Hakim, Hakim Adhoc PHI/Tipikor	Penugasan Judicial Dialog Tentang Rahasia Dagang melalui Zoom di Satker PN PLK
4.	Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H	Panmud Hukum	Sosialisasi data statistic di Walikota Palangkaraya
5.	Astiti Swanita Rini, S.H., M.H	Hakim Adhoc PHI	Pelatihan Hubungan Industrial tentang jaminan social tenaga kerja Tgl. 26 Februari 2024 tempat Jakarta
6.	Sri Widarti, S.Sos., S.H	Sekretaris	Undangan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPP Kota Palangkaraya 2025 dan RPJPP Kota Palangkaraya tahun 2025 Tgl. 28 Maret 2024 di Palangkaraya

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024

7.	Astiti Swanita Rini, S.H., M.H	Hakim adhoc PHI	Undangan Tenaga kerja dan transmigrasi pemerintah provinsi Kalimantan tengah Tgl 18 April 2024 tempat Palangkaraya
8.	1. Muhammad Ramdes, S.H 2. Sri Widarti, S.Sos., S.H 3. Jon Makmus Saragih, S.H., M.H 4. Edi Zarqoni, S.H 5. I Gusti Bagus Sandhi, S.H 6. Efraim, S.H 7. Teguh Budiono, S.H 8. Gustaf Denovan	1. Wakil Ketua 2. Sekretaris 3. Panitera 4. PM Perdata 5. PM Pidana 6. PM Khusus Tipikor 7. PM Khusus PHI 8. PPNPN	Undangan Sosialisasi Nasional Pengajuan Upaya Hukum Kasasi/PK secara elektronik Tgl.26 April 2024 tempat Satker PN Palangkaraya
9.	Semua Cakim	Cakim PN Palangkaraya	Pelatihan Diklat I Program PPCH Terpadu Peradilan Umum Tgl 13 sd 24 Mei 2024 di Satker dan Tgl 26 Mei sd 5 Juli 2024 tempat Megamendung, Bogor
10.	1. Erni Kusumawati, S.H., M.H 2. Sri Hasnawati, S.H., M.Kn 3. Muhammad affan, S.H., M.H	Hakim	Bimtek dari PT.PR Tgl 10 Januari 2024
11.	1. Kusmat Tirta Sasmita, S.H 2. Amir Mahmud Munte, S.H 3. Iis Siti Rochmah, S.H., M.H	Hakim Adhoc Tipikor	Pelatihan KPK Tgl 23 April 2024 di Palangkaraya
12.	1. Muhammad ramdes, S.H 2. Erni Kusumawati, S.H., M.H 3. Sri Hasnawati, S.H., M.kn	Wakil Ketua Hakim Hakim	Bimtek Penanganan Perkara Berbasis keadilan restoratif Tgl 17 Mei 2024 tempat Palangkaraya
13.	1. Kusmat Tirta Sasmita, S.H 2. Amir Machmud Munte, S.H 3. Iis Siti Rochmah, S.H., M.H	Hakim Adhoc Tipikor	Bimtek Peningkatan Kemampuan Aparat Penega Hakim Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28-31 Mei 2024
14.	Ainun Zaryah, S.E	Bendahara Pengeluaran	Bimtek Refresment penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran tanggal 30 Juni 2024 di Palangkaraya

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024

15.	1. Agung Sulistiyono 2. Mansyah, 3. Nanda Mario Fernandus 4. Timotius Agni Angga Kusuma	1. Ketua 2. Panitera 3. Klerek Pengelola Penanganan Perkara 4. PPNPN	Sosialisasi Monev Monitoring Penyelesaian Perkara elektronik serta kelengkapan berkas perkara tanggal 4 – 5 Juni 2024 di Pengadilan Tinggi Palangkaraya
16.	Kusmat Tirta Sasmita, S.H	Hakim Adhoc Tipikor	Bimtek Pelatihan Penyusunan Laporan kinerja Gelombang IV Kelas A secara Online di Satker
17.	Kusmat Tirta Sasmita, Darjono Abadi	Hakim Adhoc Tipikor	Kegiatan koordinasi dan Sosialisasi tentang implementasi keadilan restorative bagi pelaku dewasa tanggal 10 Juli 2024 di Palangkaraya
18.	Muhammad Ramdes, Sri Hasnawati	Wakil Ketua, Hakim	Bimtek Pelatihan Perempuan berhadapan dengan hukum CPBH tanggal 19-23 Agustus 2024 tempat Bogor Jawa Barat.
19.	Putri Prayana Tarigan	Klerek Pengelola Data dan Informasi	Bimtek Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis penggunaan Siman V2 Batch III dan IV tanggal 29 Agustus 2024 di Palangkaraya
20.	Muhammad Affan	Hakim	Bimtek Kegiatan Pendaftaran Kelas E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi tanggal 4-9 November 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah
21.	Ainun Zaryah	Fungsional Pranata Keuangan APBN Penyelia	Bimtek Kegiatan Pelatihan dan Dukungan Teknis tanggal 18 September 2024 di Palangkaraya
22.	Ainun Zaryah	Fungsional Pranata Keuangan APBN Penyelia	Bimtek Kegiatan Pelatihan dan Dukungan Teknis tanggal 1 Oktober 2024 di Palangkaraya

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024

23.	Ainun Zaryah	Fungsional Keuangan Penyelia	Pranata APBN	Kegiatan Diskusi Bersama Customer Service Officer-CSO (SiBRO) dengan tema serba serbi Bekanja Perjanan Dinas tanggal 15 Oktober 2024 di Palangkaraya
24.	Muhammad Affan	Hakim		Bimtek Pelatihan bagi Pelatih Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bagi Hakim dan Hakim Adhoc tanggal 25 November 2024 sd tanggal 1 Desember 2024 Tempat Bogor Jawa Barat.
25.	Astiti Swanita Rini	Hakim Adhoc PHI		Pelatihan bagi Pelatih Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bagi Hakim dan hakim Adhoc tanggal 25 November 2024 sd tanggal 1 Desember 2024 tempat Bogor Jawa Barat
26.	Muhammad Affan	Hakim		Pelatihan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bagi Hakim dan hakim Adhoc tanggal 25 November sd 1 Desember di Bogor Ja-bar.
27.	1. Astiti Swanita Rini 2. Dwi Harto Hanggono 3. Prapti Ramadani	Hakim adhoc PHI		Pelatihan Sertifikasi Hakim PHI bagi Hakim Karier dan Hakim Adhoc Peradilan Umum seluruh Indonesia tanggal 18 November 2024 sd 8 Desember 2024 di Jakarta
28.	Ricky Fardinand	Ketua		Pelatihan sertifikasi Hakim Persaingan Usaha Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum seluruh Indonesia di Bogor Jawa Barat

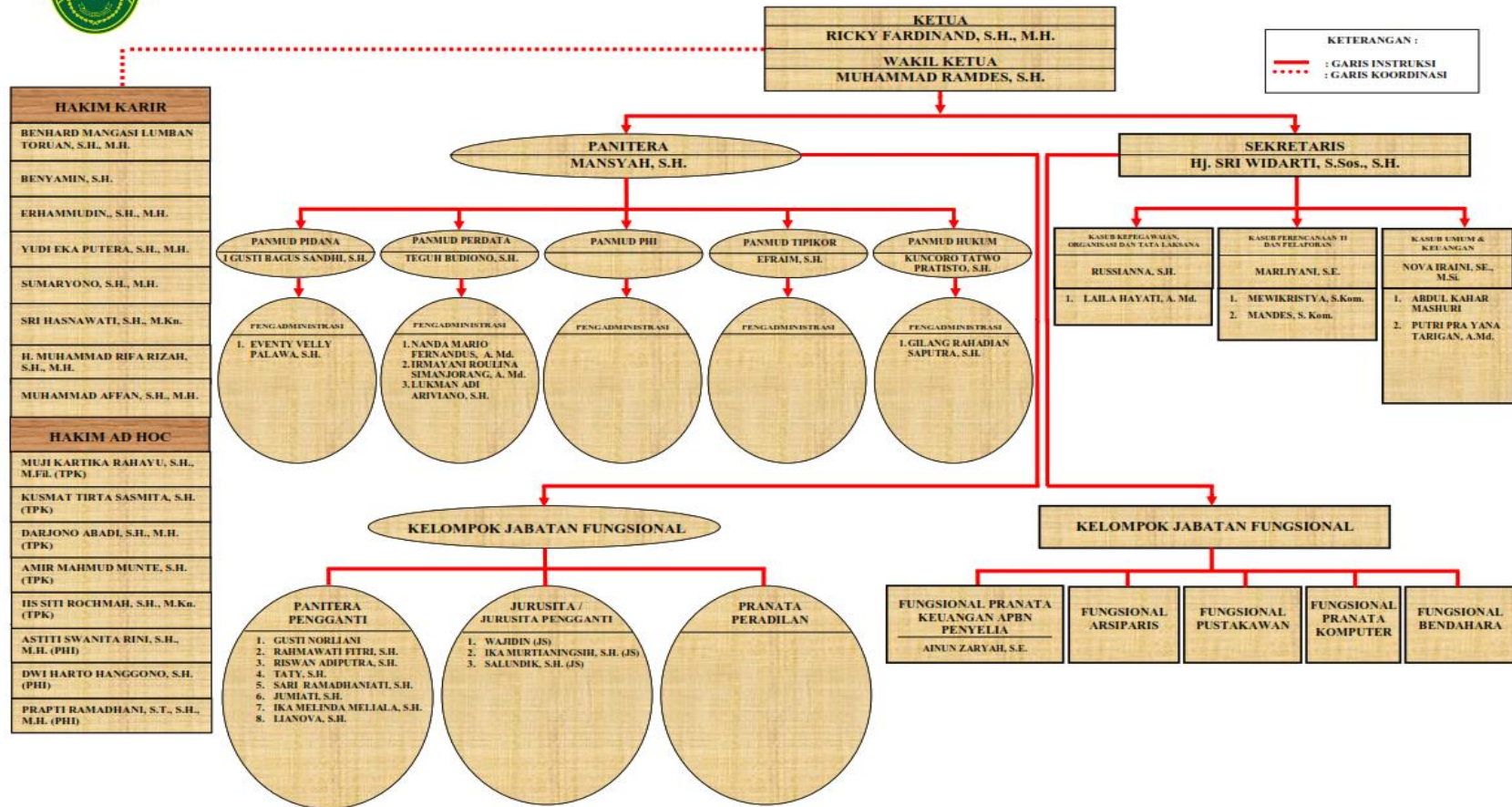
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2024

29.	1. Mewikristya 2. Abdul Kahar Mashuri	1. Klerek Penelaah Teknis Kebijakan Sub.bag PTIP 2. Klerek apengadnistrasi perkantoran subbag Umum dan Keuangan	Bimtek Pemertaan Pegawai di Lingkungan MARI dan Badan Peradilan Umum tanggal 25 November 2024 secara Daring
30.	1. Mandes 2. Laila Hayati	1. Oprator Penata Layanan Operasional Subbag PTIP 2. Pengolah data dan Informasi subbag Kepegawaian Ortala	Bimtek Pemertaan Pegawai di Lingkungan MARI dan Badan Peradilan Umum tanggal 28 November 2024 secara Daring
31.	Ricky Fardinand	Ketua	Undangan Kolokium Yudisial tanggal 9-13 Desember 2024 di Surabaya



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Keskretariat Peradilan



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Terdapat 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Palangkaraya Tahun 2024, yaitu terdiri dari DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) yang telah di revisi sebanyak 8 (delapan) kali dan DIPA 03 (Dirjen Badan Peradilan Umum) yang telah di revisi sebanyak 5 (lima) kali. Adapun realisasi anggaran pada masing-masing DIPA yaitu sebagai berikut:

Perbandingan antara Pagu dan Realisasi Anggaran 2024 DIPA 01

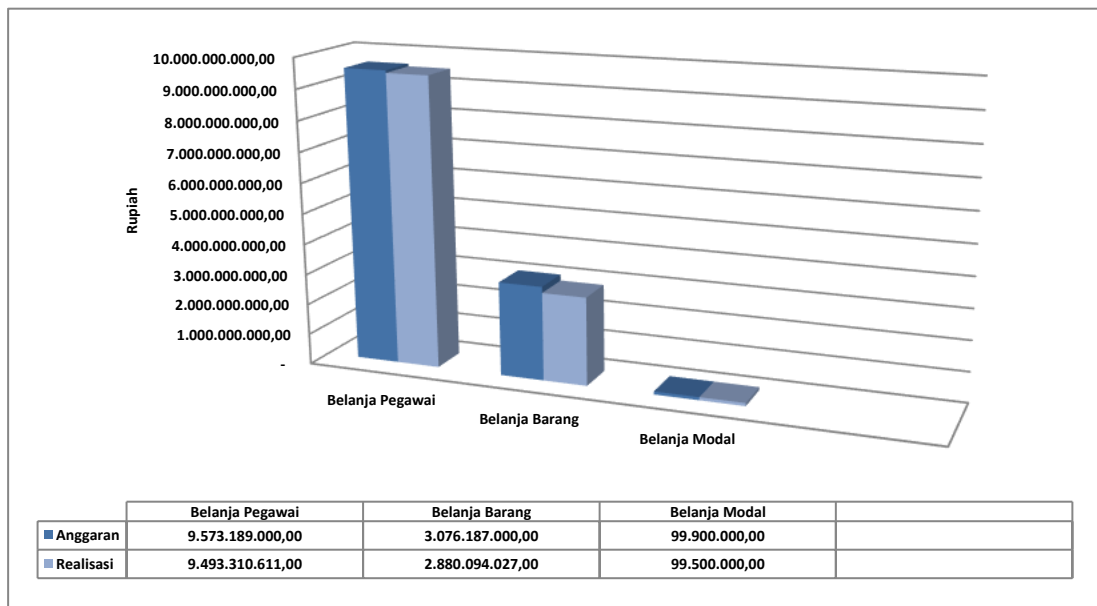
NO.	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Program Dukungan Manajemen	12.749.276.000	12.472.904.638	97.83

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Palangkaraya tahun 2024 DIPA 01 adalah sebesar Rp. 12.472.904.638,- atau sebesar 97.83% dari anggaran senilai Rp. 12.749.276.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	9.573.189.000	9.493.310.611	99.17
Belanja Barang	3.076.187.000	2.880.094.027	93.63
Belanja Modal	99.900.000	99.500.000	99.60
Total Belanja Bruto	12.749.276.000	12.472.904.638	97.83
Pengembalian Belanja			0
Total Belanja Netto	12.749.276.000	12.472.904.638	97.83

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024



Perbandingan realisasi belanja TA 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2024 dan Tahun 2023 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Naik (Turun)
			Rp
Belanja Pegawai	9.493.310.611	8.324.917.867	1.168.392.744
Belanja Barang	2.880.094.027	2.887.097.117	-7.003.090
Belanja Modal	99.500.000	148.713.000	-49.213.000
Total Belanja	12.472.904.638	11.360.727.984	1.112.176.654

Perbandingan antara Pagu dan Realisasi Anggaran 2024 DIPA 03

NO.	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi Rp)	Persentase (%)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	245.450.000,-	229.473.150,-	93.49%

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2024

Perbandingan realisasi belanja TA 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	2024	2023	Naik (Turun)
			Rp
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	229.473.150	261.731.450	-32.258.300
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja	229.473.150	261.731.450	-32.258.300

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pada tahun anggaran 2024 Pengadilan Negeri Palangkaraya mendapatkan anggaran Belanja Peralatan dan Mesin-Intrakomtabel berupa Pengadaan Peralatan Fasilitas perkantoran yaitu Rak Besi, LCD Monitor dan Scanner sebesar Rp. 99.500.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Selain itu Pengadilan Negeri Palangkaraya juga mendapatkan penambahan sarana dari Hibah Masuk dari Swadaya Rp. 73.000.000,- berupa Rak Besi dan AC. Adapun rincian Hibah masuk tersebut yaitu sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Rak Besi Hitam	1 Unit	6.500.000	6.500.000
2	Rak Besi Hitam	1 Unit	4.000.000	4.000.000
3	Rak Besi Siku Lubang	19 Unit	1.500.000	28.500.000
4.	Rak Besi Siku Lubang	7 Unit	1.200.000	8.400.000
5.	Rak Besi	7 Unit	3.200.000	22.400.000
6.	AC Split	1 Unit	3.200.000	3.200.000
TOTAL				73.000.000

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2024

Matrik sarana /prasarana pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

No.	Sarana/Prasarana Kantor	Jumlah	Keterangan
I	Sarana/Prasarana Gedung	2	Gedung Pengadilan Negeri Palangkaraya (Diponegoro) dan Pengadilan Negeri Tipikor (Seth Adji)
1.	Ruang Ketua	2	
2.	Ruang Wakil Ketua	2	
3.	Ruang Panitera	2	
4.	Ruang Sekretaris	1	
5.	Ruang Sidang	5	Ruang Sidang Elektronik = 2 Ruang sidang umum = 2 Ruang Sidang anak= 1
6.	Ruang Kepaniteraan	5	
7.	Ruang Panitera Pengganti	1	
8.	Ruang Tunggu Pers	2	
9.	Ruang Tunggu Penasihat Hukum	2	
10.	Ruang Mediasi	1	
11.	Ruang Pos Bakum	1	
12.	Ruang Kesekretariatan	3	
13.	Ruang Server/ IT	2	
14.	Ruang Perpustakaan	1	
15.	Ruang Kesehatan	1	
16.	Mushola	1	
17.	Ruang Sidang Tipikor/ PHI	2	Ruang sidang elektronik = 1 Ruang sidang umum = 1

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2024

18.	Ruang Pertemuan (Command Center)	1	
19	Ruang Tamu Terbuka	2	
20.	Ruang Pojok E-Court	1	
21.	Ruang Inzage	1	
22.	Ruang Tunggu Anak	1	
23.	Ruang Ramah Anak	1	
24.	Ruang Teleconference	1	
25.	Ruang Arsip	5	
26.	Ruang Tahanan	5	Ruang Tahanan Wanita = 2, Ruang tahanan Anak 1, Ruang Tahanan Laki-Laki= 2
27.	Ruang Hakim	4	

No.	Sarana/Prasarana Kantor	Jumlah	Keterangan
II	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Server	4 Unit	Kondisi Baik 4
2	Router	1 Unit	Kondisi Baik 1
3	Switch Hub	2 Unit	Kondisi Baik 2
4	Netware Interface External	6 Unit	Kondisi Baik 6
5	Rak Server	1 Unit	Kondisi Baik 1
6	P.C unit	70 Unit	Kondisi Baik 70
7	Laptop	24 Unit	Kondisi Baik 24
8	Peralatan Jaringan Lainnya	5 Unit	Kondisi Baik 5
9	Camera Digital	1 Unit	Kondisi Baik 1

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2024

10	Monitor	4 Unit	Kondisi Baik 4
11	Printer	23 Unit	Kondisi Baik 23
12	CCTV	17 Unit	Kondisi Baik 17
13	Mesin Absensi	3 Unit	Kondisi Baik 3
14	Sound System	1 Unit	Kondisi Baik 1
15	Uninterruptible Power Supply (UPS)	13 Unit	Kondisi Baik 13
16	Pesawat Telephone	1 Unit	Kondisi Baik 1
17	Facsimile	1 Unit	Kondisi Baik 1
18	Internet	1 Unit	Kondisi Baik1
19	Hard Disk	2 Unit	Kondisi Baik 2
20	Speaker computer	6 Unit	Kondisi Baik 6
21	CPU	1 Unit	Kondisi Baik 1
22	Genset	2 Unit	Kondisi Baik 1 Rusak Berat 1
23	Lemari Besi/ Metal	10 Unit	Kondisi Baik 10
24	Lemari Kayu	74 Unit	Kondisi Baik 74
25	Rak Besi	103 Unit	Kondisi Baik 103
26	Filing Cabinet Besi	20 Unit	Kondisi Baik 20
27	Brankas	3 Unit	Kondisi Baik 3
28	Alat Pemotong Kertas	3 Unit	Kondisi Baik 3
29	Meja Kerja Kayu	148 Unit	Kondisi Baik 148
30	Kursi Besi/ Metal	205 Unit	Kondisi Baik 205
31	Kursi Kayu	105 Unit	Kondisi Baik 105

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2024

32	Sice	17 Unit	Kondisi Baik 17
33	Bangku Panjang Besi/ Metal	4 Unit	Kondisi Baik 4
34	Bangku Panjang Kayu	16 Unit	Kondisi Baik 16
35	Meja Rapat	6 Unit	Kondisi Baik 6
36	Meja Komputer	4 Unit	Kondisi Baik 4
37	AC Split	67 Unit	Kondisi Baik 67
38	Buffet	3 Unit	Kondisi Baik 3
39	LCD Projector/ Infocus	1 Unit	Kondisi Baik 1
40	Kotak Surat	5 Unit	Kondisi Baik 5
41	Papan Visual/ Papan Nama	29 Unit	Kondisi Baik 29
42	Teralis	1 Unit	Kondisi Baik 1
43	Perkakas Kantor Lainnya	4 Unit	Kondisi Baik 4
44	Meja Resepsonis	2 Unit	Kondisi Baik 2
45	Kursi Fiber Glas/ Plastik	75 Unit	Kondisi Baik 75
46	Gantungan Jas	1 Unit	Kondisi Baik 1
47	Jam Elektronik	7 Unit	Kondisi Baik 7
48	Mesin Penghisap Debu/ Vacuum Cleaner	1 Unit	Kondisi Baik 1
49	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	8 Unit	Kondisi Baik 8
50	Exhause Fan	3 Unit	Kondisi Baik 3
51	Treng Air/ Tandon Air	1 Unit	Kondisi Baik 1
52	Televisi	8 Unit	Kondisi Baik 8
53	Lambang Garuda Pancasila	5 Unit	Kondisi Baik 5
54	Gambar Presiden/ Wakil Presiden	1 Unit	Kondisi Baik 1

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2024

55	Tiang Bendera	8 Unit	Kondisi Baik 8
56	Dispenser	6 Unit	Kondisi Baik 6
57	Palu Sidang	4 Unit	Kondisi Baik 4
58	Lambang Instansi	2 Unit	Kondisi Baik 2
59	Asbak Tinggi	6 Unit	Kondisi Baik 6
60	Bingkai Foto	1 Unit	Kondisi Baik 1
61	Audio Mixing Portable	3 Unit	Kondisi Baik 3
62	Alat Studio Lainnya	1 Unit	Kondisi Baik 1
63	Telephone (PABX)	20 Unit	Kondisi Baik 20
64	Charger	1 Unit	Kondisi Baik 1
65	Kursi Dorong	1 Unit	Kondisi Baik 1
66	TV Monitor	1 Unit	Kondisi Baik 1
67	Alat Pemadam Kebakaran	6 Unit	Kondisi Baik 6
68	Alat Press Kertas	1 Unit	Kondisi Baik 1
69	Tameng	5 Unit	Kondisi Baik 5
70	Komputer Jaringan Lainnya	1 Unit	Kondisi Baik 1
71	Peralatan Permainan Lainnya	1 Unit	Kondisi Baik 1
72	Piala	25 Unit	Kondisi Baik 25
73	Scanner (Peralatan Personal Komputer	8 Unit	Kondisi Baik 8
74	Digital Led Running Text	1 Unit	Kondisi Baik 1
75	Camera Conference	3 Unit	Kondisi Baik 3
76	Tablet PC	1 Unit	Kondisi Baik 1
77	Mesin Barcode	1 Unit	Kondisi Baik 1

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2024

78	Mesin Antrian	2 Unit	Kondisi Baik 2
79	Loudspeaker	12 Unit	Kondisi Baik 12
80	Microphone	21 Unit	Kondisi Baik 21
81	Mic Conference	8 Unit	Kondisi Baik 8
82	Gordyin	3 Unit	Kondisi Baik 3
83	Bracket Standing Peralatan	1 Unit	Kondisi Baik 1
84	Audio Mixing Console	1 Unit	Kondisi Baik 1
85	LCD Monitor	3 Unit	Kondisi Baik 3
86	Termometer Mercury Suhu Badan	1 Unit	Kondisi Baik 1
87	Thermometer Gun	2 Unit	Kondisi Baik 2
89	Alat Kedokteran Umum Lainnya	4 Unit	Kondisi Baik 4
90	Walker Polding	3 Unit	Kondisi Baik 3
91	Buku Buta Warna	7 Unit	Kondisi Baik 7
92	Network Monitoring System	1 Unit	Kondisi Baik 1
93	Software Komputer	2 Unit	Kondisi Baik 2
94	Alat Kantor Lainnya	2 Unit	Kondisi Baik 2

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024

Matrik Kendaraan Dinas pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Roda 4					
1.	New Mazda Sedan	2011	√			
2.	Toyota Vios	2006	√			
3.	Toyota Kijang	2001	√			
4.	Toyota Innova E	2006	√			
5.	Toyota Fortuner (Pinjam Pakai)	2019	√			
II	Roda 2					
6.	Honda Mega Pro	2005			√	
7.	Yamaha Jupiter MX	2006	√			
8.	Yamaha Jupiter MX	2006	√			
9.	Yamaha Jupiter Z	2005	√			
10.	Yamaha Jupiter MX	2007	√			
11.	Honda GL Max	2003			√	
12.	Honda GL Max	2003			√	
13.	HondaKharisma/ Kharisma NF125D	2006				Hilang

Penjelasan dari tabel diatas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mobil dengan nomor polis KH 1228 AU; type sedan; merk New Mazda; tahun pembuatan 2010; nomor mesin ZY451710; nomor rangka MM6DE10Y1C0192620; nomor BPKB J00149039M; tahun perolehan 2011; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Palangkaraya dan digunakan sebagai mobil dinas operasional Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya.
2. Mobil dengan nomor polis KH 1175 AU; type sedan; merk Toyota Vios; tahun pembuatan 2006; nomor mesin 1NZX490489; nomor rangka MR053HY4269036530; nomor BPKB E3461266G; tahun perolehan 2006; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Palangkaraya dan digunakan sebagai mobil dinas operasional Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya.

3. Mobil dengan nomor polis KH 1357 AU; type station wagon; merk Toyota KKF 80 Long; tahun pembuatan 2001; nomor mesin 7K0425845; nomor rangka MHF11KF8010065874; nomor BPKB B0703018M; tahun perolehan 2006; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Palangkaraya dan digunakan sebagai mobil dinas operasional Sekretaris Pengadilan Negeri Palangkaraya.
4. Mobil dengan nomor polis KH 1095 TU; type mini bus; merk Kijang Inova E; tahun pembuatan 2006; nomor mesin 1TR6243360; nomor rangka MHFXW41G960016792; nomor BPKB E1044874M; tahun perolehan 2006; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Palangkaraya dan digunakan sebagai mobil dinas operasional Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya.
5. Mobil dengan nomor polis KH 1883 AU; merk Toyota Fotuner 2.1 VRZ; tahun pembuatan 2019; nomor mesin 2GDC523439; nomor rangka MHFGB8GS2K0892547; nomor BPKB O06847535M; tahun perolehan 2022; tercatat sebagai barang Pihak Ketiga pada Pengadilan Negeri Palangkaraya berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai 029/8844/Bag.Um/XI/2022-W16.U1/4322/PL.06/XI/2022 pada tanggal 12 November 2022 dengan pengguna ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya.
6. Sepeda Motor dengan nomor polis KH 3643 AY; type Honda Mega Pro tahun pembuatan 2005; nomor mesin KEHLE1139; nomor rangka MH1KEHIK164287; nomor BPKB D8616347M; tahun perolehan 2006; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Palangkaraya dan dengan kondisi rusak berat dan akan diusulkan penghapusan.
7. Sepeda Motor dengan nomor polis KH 3678 AY; type Yamaha Jupiter MX tahun pembuatan 2006; nomor mesin 1S7076374; nomor rangka MH31970016K075949; nomor BPKB D9091088M; tahun perolehan 2006; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Palangkaraya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Palangkaraya.

8. Sepeda Motor dengan nomor polis KH 3680 AY; type Yamaha Jupiter MX tahun pembuatan 2006; nomor mesin 1S7076140; nomor rangka MH31970016K076092; nomor BPKB D9091089M; tahun perolehan 2006; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Palangkaraya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Palangkaraya.
9. Sepeda Motor dengan nomor polis KH 3502 AY; type Yamaha Jupiter Z tahun pembuatan 2005; nomor mesin STP719432; nomor rangka MH3STP0065K472888; nomor BPKB D3169581M; tahun perolehan 2005; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Palangkaraya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya.
10. Sepeda Motor dengan nomor polis KH 4557 AY; type Yamaha Jupiter MX tahun pembuatan 2007; nomor mesin E6404390M; nomor rangka MH31S70037K255091; nomor BPKB 1S7255113; tahun perolehan 2007; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Palangkaraya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Kasub Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Palangkaraya.
11. Sepeda Motor dengan nomor polis KH 4388 AY; type Honda GL MX tahun pembuatan 2003; nomor mesin AUBEE1045005; nomor rangka MH1UABE1133K045321; nomor BPKB C7083800M; tahun perolehan 2003; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Palangkaraya dan dengan kondisi rusak berat dan akan diusulkan penghapusan.
12. Sepeda Motor dengan nomor polis KH 4398 AY; type Honda GL MX tahun pembuatan 2003; nomor mesin AUBEE1045064; nomor rangka MH1UABE133K045271; nomor BPKB C7083807M; tahun perolehan 2003; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Palangkaraya dan dengan kondisi rusak berat dan akan diusulkan penghapusan.
13. Sepeda Motor dengan nomor polis KH 3644 AY; type Honda Kharisma tahun pembuatan 2005; nomor mesin JB22E1562962; nomor rangka MH1JB22135K564635; tahun perolehan 2006; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Palangkaraya dan dengan kondisi hilang dan akan diusulkan penghapusan.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024

Matrik Rumah Dinas pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					
1.	Rumah Dinas Ketua	1	√			
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	√			
3.	Rumah Dinas Hakim	6	√		√	Baik = 5 Rusak berat = 1 (mengalami kebakaran)
4.	Rumah Dinas Panitera	1	√			
5.	Rumah Dinas Sekretaris	-				Belum ada

Penjelasan dari table diatas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 120 m², golongan I tipe B Permanen berdiri diatas tanah dengan luas 2166 m². Sertifikat nomor 2701 tanggal 25 september 2002 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak dijalan Cilik Riwut No. 21 Palangka Raya Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya.
2. Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 120 m², golongan I tipe B Permanen berdiri diatas tanah dengan luas 750 m². Sertifikat nomor 2849 tanggal 27 April 1977 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak dijalan Dahlia No. 4 Palangka Raya Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya.
3. Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 70 m², golongan II tipe C Permanen berdiri diatas tanah dengan luas 1200 m². Sertifikat nomor 33 tanggal 17 Mei 1980 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak

- dijalan C. Bangas Palangka Raya Kalimantan Tengah dan saat ini digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya.
4. Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 70 m², golongan II tipe C Permanen berdiri diatas tanah dengan luas 1200 m². Sertifikat nomor 35 tanggal 17 Mei 1980 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak dijalan G. Obos No. 7 Palangka Raya Kalimantan Tengah dan saat ini digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya.
 5. Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 70 m², golongan II tipe C Permanen berdiri diatas tanah dengan luas 1200 m². Sertifikat nomor 193 tanggal 06 November 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak dijalan L. Mangkurat No. 11 Palangka Raya Kalimantan Tengah dan saat ini digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya.
 6. Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 70 m², golongan II tipe C Permanen berdiri diatas tanah dengan luas 1157 m². Sertifikat nomor 192 tanggal 08 November 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak dijalan L. Mangkurat No. 13 Palangka Raya Kalimantan Tengah dan saat ini digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya.
 7. Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 70 m², golongan II tipe C Permanen berdiri diatas tanah dengan luas 1156 m². Sertifikat nomor 191 tanggal 08 November 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak dijalan Untung Suropati No. 19 Palangka Raya Kalimantan Tengah dan saat ini dalam keadaan rusak berat
 8. Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 70 m², golongan II tipe C Permanen berdiri diatas tanah dengan luas 1156 m². Sertifikat nomor 194 tanggal 08 November 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak dijalan Untung Suropati No. 21 Palangka Raya Kalimantan Tengah dan saat ini digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya.

9. Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 70 m², golongan II tipe C Permanen berdiri diatas tanah dengan luas 1271 m². Sertifikat nomor 190 tanggal 08 November 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Untung Suropati No. 23 Palangka Raya Kalimantan Tengah dan saat ini dalam keadaan kosong.

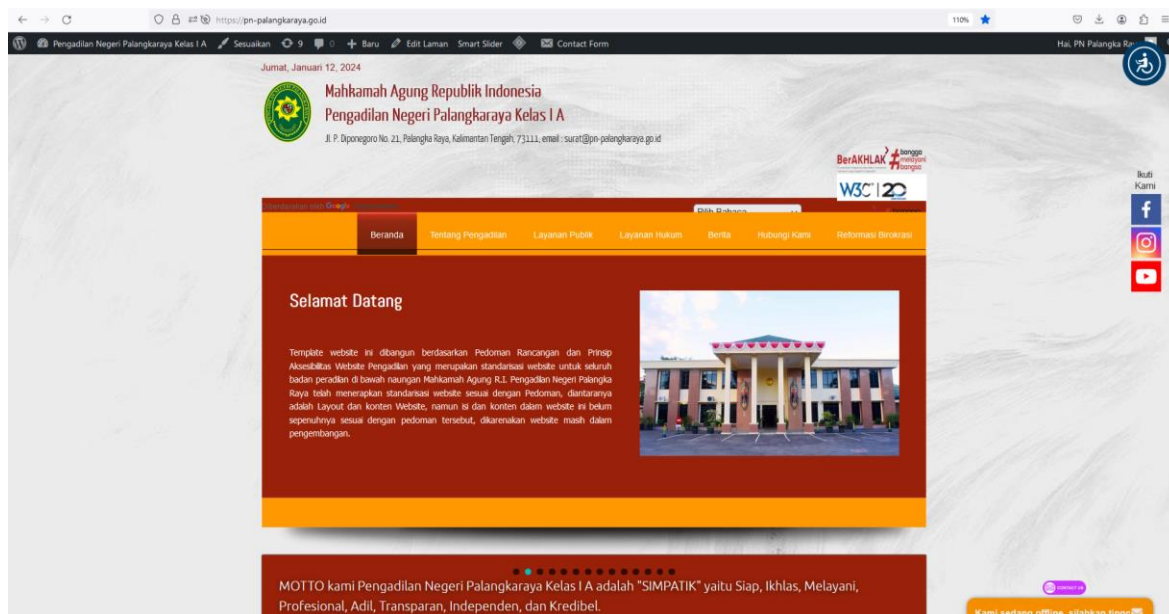
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam Rangka terwujudnya Badan Peradilan yang Agung, Pengadilan Negeri Palangkaraya menempatkan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) sebagai salah satu prioritas perubahan, yang diharapkan dapat memiliki manajemen informasi yang menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta organisasi modern berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu. Perangkat pendukung TI tersedia yakni:

Alamat Website dan SIPP	VERSI SIPP	Nama Provider Internet Dan Bandwitdh	Model/Type Server	Fungsi Server
https://pn-palangkaraya.go.id https://sipp.pn-palangkaraya.go.id/	5.6.4	ICON+ 120 Mbps 1:1 (Dedicated)	✓ Fujitsu PRIMERGY RX 1330 M1 ✓ Fujitsu PRIMERGY TX 1330 M4	✓ SIPP,PTSP, MIS,Sinkroniasi, Data Cloud, Antrian sidang dan aplikasi lain-lain ✓ Backup Data SIPP dan MIS

Salah satu pemanfaatan Teknologi informasi adalah diwajibkannya setiap Pengadilan mempunyai *website* termasuk Pengadilan Negeri Palangkaraya sendiri. Dalam era digitalisasi sekarang ini website mempunyai peran sangat penting, karena dengan adanya website akan tercipta transparansi segala kegiatan yang ada di badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, khususnya Peradilan Umum. Melalui website keterbukaan

informasi publik maupun keterbukaan pelayanan publik akan mudah diakses oleh masyarakat pengguna pengadilan. Tampilan Website Pengadilan Negeri Palangkaraya yaitu sebagai berikut:



Gambar : Website Pengadilan Negeri Palangkaraya

Minimnya tenaga yang mempunyai keahlian di bidang TI, merupakan tantangan tersendiri bagi pengembangan pemanfaatan Teknologi Informasi, karena untuk masa yang akan datang Teknologi Informasi adalah sarana utama dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing aparat Pengadilan. Pengadilan Negeri Palangkaraya akan terus mendorong para pegawai untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan tentang Teknologi Informasi.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan *e-Court* adalah inovasi andalan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan administrasi perkara secara elektronik. **SIPP** adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari

informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah. Kedua adalah **e-Court** yang merupakan sebuah instrumen Pengadilan yang terintegrasi dengan SIPP sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, pengiriman dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, dan jawaban), pemanggilan secara *online*, dan penyampaian salinan putusan secara *online*. Dengan aplikasi ini masyarakat melalui kuasanya akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

1. Implementasi e-court pada Pengadilan Negeri Palangkaraya

Pengadilan Negeri Palangkaraya adalah satu dari satuan kerja yang ditunjuk sebagai pengadilan percontohan untuk e-litigasi yang merupakan kelanjutan dari e-court. E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan secara online. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

E-Court merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Palangkaraya telah menerima 227 perkara perdata gugatan, 2 perkara Bantahan, 30 perkara perdata gugatan sederhana dan 103 perkara perdata permohonan.



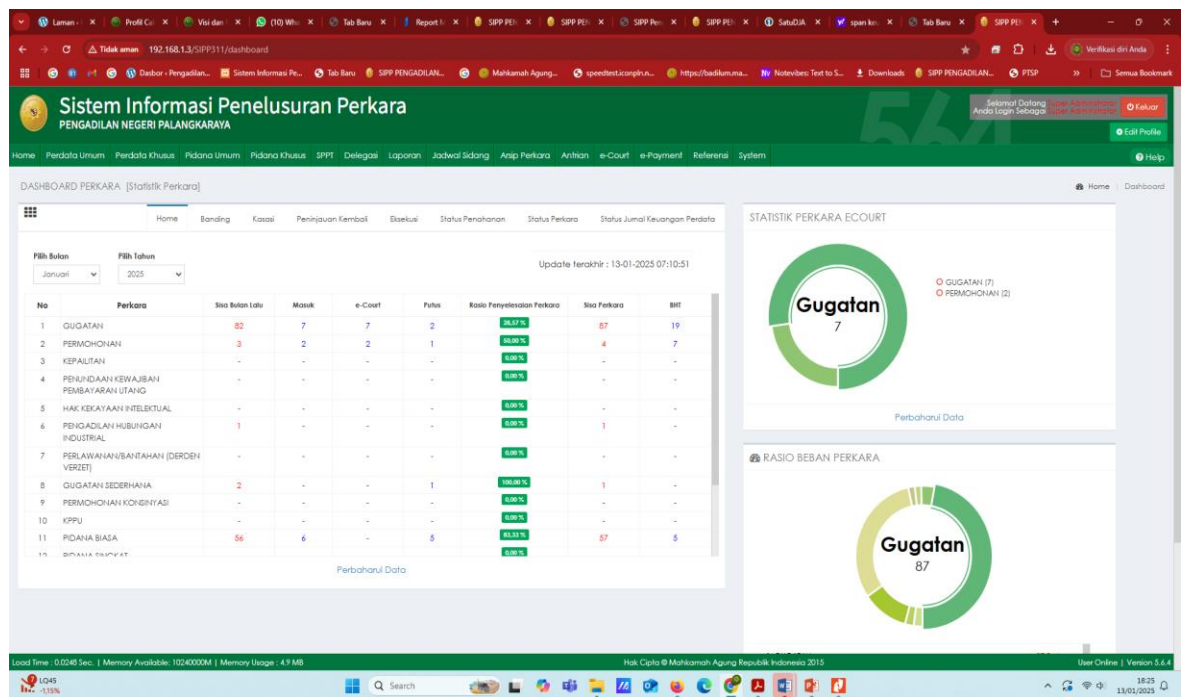
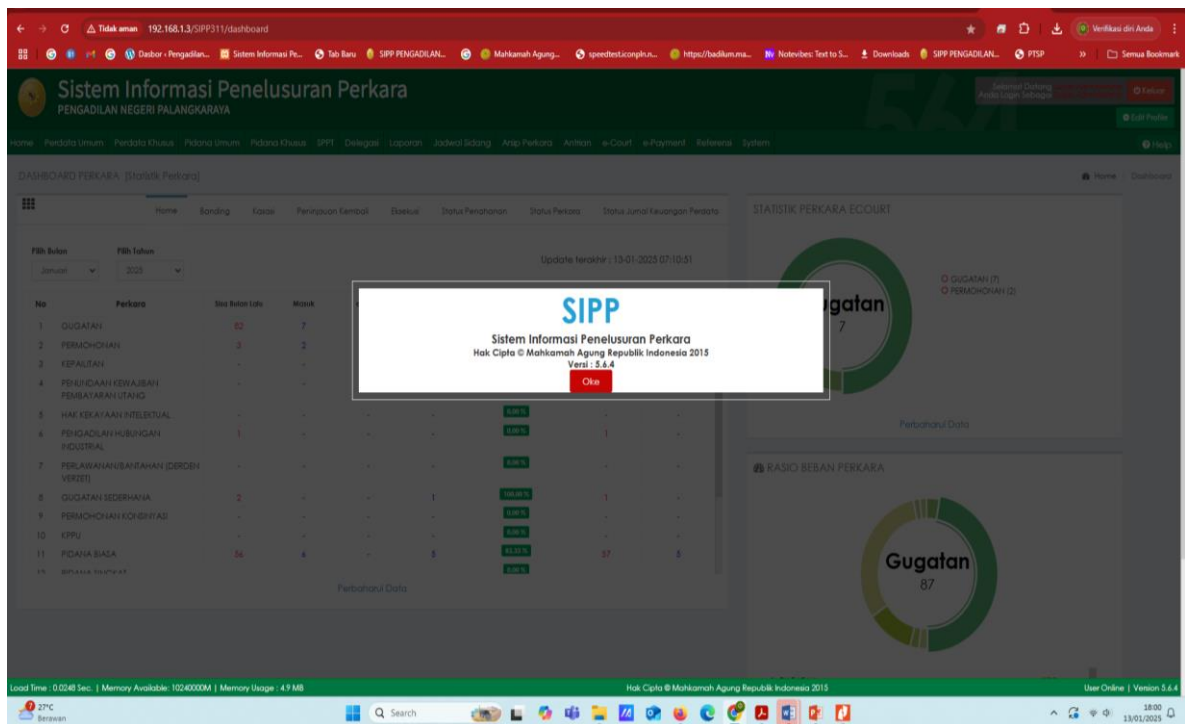
2. Implementasi SIPP pada Pengadilan Negeri Palangkaraya

SIPP merupakan aplikasi teknologi berbasis web untuk memberikan semua informasi perkara terkait proses penanganan perkara. Misalnya, pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah. Selain itu, aplikasi SIPP ini difungsikan pimpinan pengadilan memonitor kinerja hakim dan aparaturnya pengadilan, tertib administrasi sebagai media kerja yang efektif bagi internal pengadilan termasuk pengawasan media.

SIPP Pengadilan Negeri Palangkaraya pada Tahun 2024 sudah menggunakan versi terbaru yakni versi 5.6.4.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2024



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Mahkamah Agung, maka Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Mahkamah Agung menjadi kelanjutan dari program APM yang bertujuan agar satuan kerja di bawah Lingkungan Badan Peradilan Umum mampu memberikan jaminan pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan secara profesional dan pelayanan berkualitas bagi Pengguna Pengadilan sesuai standar serta mampu memenuhi persyaratan dan kebutuhan Pengguna Pengadilan.

Perubahan APM menjadi AMPUH pada pengadilan merupakan transformasi dari Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) menjadi sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh. AMPUH merupakan bentuk pembinaan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum). Adapun tujuan dari pemberlakuan program AMPUH ini adalah untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integrasi tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Kemudian ruang lingkup program AMPUH meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Program AMPUH juga merupakan program peningkatan dari program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang sudah diberlakukan sejak tahun 2014. Program AMPUH memiliki 5 kategori Predikat yaitu Cukup, Baik, Utama, Unggul dan Paripurna. Khusus untuk predikat Paripurna hanya dapat diraih apabila Satuan Kerja sudah meraih predikat Unggul selama 3 tahun berturut-turut.

Pada tanggal 16 Agustus Tim Asesmen AMPUH Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI 2024 mengunjungi Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam rangka Penilaian Administrasi Peradilan Umum dan Penilaian Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH). Selanjutnya berdasarkan Petikan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024 Tentang Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, Kelas IA, Kelas IB dan kelas II Tahun 2024, Pengadilan Negeri Palangkaraya berhasil mendapatkan predikat **Utama**.



Gambar: Penilaian Ampuh Pengadilan Negeri Palangkaraya oleh Tim Ampuh Dirjen
Badilum Mahkamah Agung R.I.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tanggal 26 Februari 2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Bab I Pasal1 disebutkan bahwa:

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.
2. Penyelenggara PTSP adalah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
3. Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah Panitera dan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
4. Pelayanan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka melayani kebutuhan yang diselenggarakan oleh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri bagi masyarakat pencari keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
5. Pidana yang dimaksud dalam keputusan ini adalah pidana umum dan pidana khusus.
6. Perdata yang dimaksud dalam keputusan ini adalah perdata umum dan perdata khusus.

PTSP bertujuan untuk:

- Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

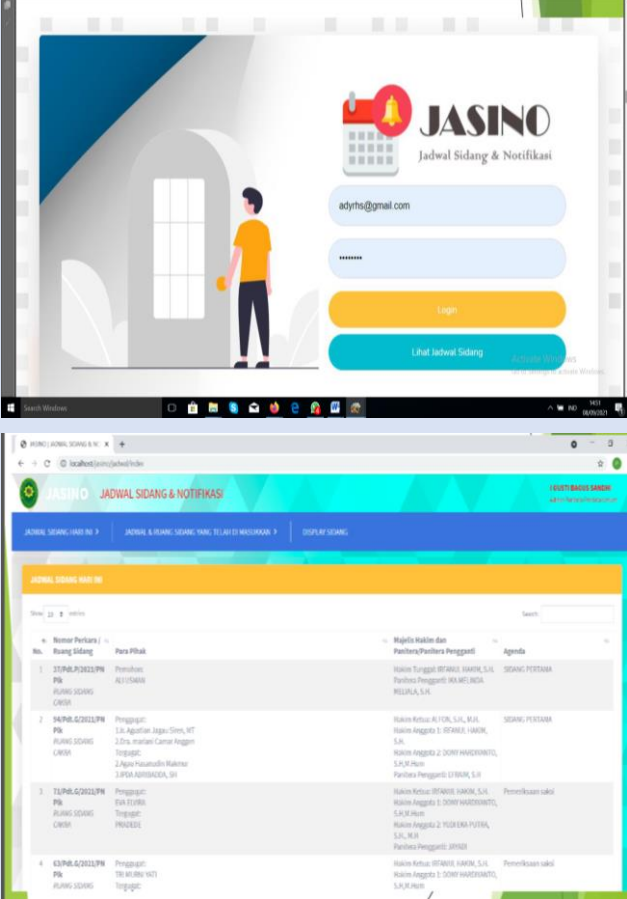
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024

Pada Tahun 2024 Pengadilan Negeri Palangkaraya menerima surat masuk sebanyak 1.508 dan 3.046 surat keluar yang telah didokumentasikan secara elektronik melalui aplikasi PTSP, sehingga memudahkan dan mempercepat dalam tata persuratan.



C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi Pelayanan Publik yang ada di Pengadilan Negeri Palangkaraya yaitu sebagai berikut:

No	Kategori	Jenis Inovasi	Penjelasan
1.	EKSTERNAL	APLIKASI JASINO (Jadwal Sidang dan Notifikasi)	

Hal. 59

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2024

JASINO JADWAL SIDANG & NOTIFIKASI

DAFTAR SIDANG

Jadwal Sidang Hari Ini

No.	Ruang Perkara & Ruang Sidang	Persa Pihak	Majelis Hakim & Panitia Pengganti	Agenda
1	27/Pdt.P/2023/PN.Pdt RUANG SIDANG CANDA	Pemohon: ALYONIA	Majelis Hakim: PRANATA HARMA SIA, SH Panitia Pengganti: PAWEL HARMA SIA, SH KORUWALAN HARMA SIA, SH	SIDANG PERSAMA
2	14/Pdt.G/2023/PN.Pdt RUANG SIDANG CANDA	Pemohon: 1.1. Ngilman Laga Sirey, RT 2.2. Nani Center Center Angger Teguh 3.3. Nani Nani Nani 4.4. Nani Nani Nani	Majelis Hakim: ALYONIA SIA, SH PRANATA HARMA SIA, SH KORUWALAN HARMA SIA, SH Panitia Pengganti: PAWEL HARMA SIA, SH	SIDANG PERSAMA
3	71/Pdt.G/2023/PN.Pdt RUANG SIDANG CANDA	Pengguna: GALUSIA Pengguna: PRANATA	Majelis Hakim: PRANATA HARMA SIA, SH KORUWALAN HARMA SIA, SH KORUWALAN HARMA SIA, SH Panitia Pengganti: PAWEL HARMA SIA, SH	Persidangan Paksi
4	63/Pdt.G/2023/PN.Pdt RUANG SIDANG CANDA	Pengguna: TELUK NANI Pengguna: GALUSIA PRANATA	Majelis Hakim: PRANATA HARMA SIA, SH KORUWALAN HARMA SIA, SH KORUWALAN HARMA SIA, SH Panitia Pengganti: PAWEL HARMA SIA, SH	Persidangan Paksi

JASINO JADWAL SIDANG & NOTIFIKASI

DAFTAR JADWAL SIDANG

No.	Ruang Perkara & Ruang Sidang	Persa Pihak	Majelis Hakim & Panitia Pengganti	Agenda
1	211/Pdt.G/2020/PN.Pdt RUANG SIDANG CANDA Pdt: 2023/2023 Pdt: 2023/2023	Pengguna: DR. JES JES SIA, SH Pengguna: PRANATA HARMA SIA, SH KORUWALAN HARMA SIA, SH	Majelis Hakim: ALYONIA SIA, SH PRANATA HARMA SIA, SH KORUWALAN HARMA SIA, SH Panitia Pengganti: PAWEL HARMA SIA, SH	Resolusi dan Persidangan

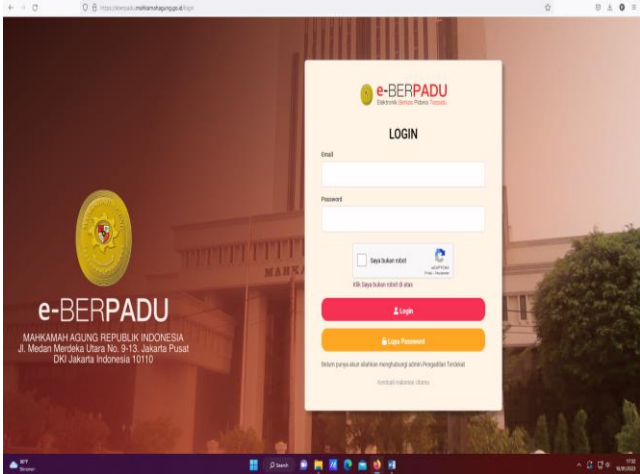
Copyright © 2023 PN Palangkaraya - Des. By D.A.C

Aplikasi ini digunakan untuk mengetahui jadwal sidang yang telah ditentukan/ didaftarkan oleh majelis hakim ketika masyarakat/pengguna pengadilan telah mendaftarkan perkara mereka, pada saat bersamaan ketika jadwal sidang sudah dimasukan/ditentukan waktunya, akan otomatis muncul pada display ruang tunggu sidang, sehingga akan memudahkan para pencari keadilan mengetahui jadwal sidang dan waktu tunggu yang diperlukan berdasarkan perkiraan yang telah ditetapkan pada saat penginputan waktu pelaksanaan sidang dan ruang sidang. Adapun aksesnya melalui <http://192.168.1.3/jasino>

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2024

2.	EKSTERNAL	MESIN ANTRIAN PTSP	 Adalah alat yang digunakan untuk antrian PTSP agar pelayanan dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan cara melayani secara berurutan sesuai dengan kedatangan pengunjung.
----	-----------	--------------------	--

			Adalah aplikasi yang digunakan untuk memudahkan mendata dan memanggil para pihak yang hadir dan siap untuk disidangkan sesuai dengan antrian sidang.
5.	EKSTERNAL	MESIN ANTRIAN SIDANG	  Antrian Sidang Pengadilan merupakan aplikasi untuk manajemen antrian sidang di Pengadilan. Antrian Sidang Pengadilan secara otomatis terkoneksi dengan aplikasi manajemen perkara SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sehingga menampilkan aplikasi antrian sidang secara otomatis dapat menampilkan jadwal sidang harian secara otomatis. Antrian Sidang Pengadilan tidak hanya menampilkan jadwal sidang secara otomatis, tetapi juga dapat memanggil panggilan persidangan dengan menyebutkan Nomor Perkara, Para Pihak, Agenda dan

			Jam Sidang secara otomatis dibunyikan saat ditekan tombol panggil. Antrian Sidang Pengadilan juga mampu menampilkan kehadiran pihak kepada Hakim dan Panitera Pengganti sehingga dapat diketahui, apakah pihak sudah hadir atau belum sehingga bisa diputuskan jika sudah waktunya jatuh tempo jam sidang sesuai jadwal sidang di SIPP dapat dipanggil atau tidak dengan diambil keputusan oleh Majelis Hakim setelah mengetahui kehadiran pihak. Antrian Sidang Pengadilan juga dapat memberikan pemberitahuan persidangan kepada para pihak 1 hari sebelum jatuh tempo hari sidang, atau secara otomatis dapat memberikan info kepada para pihak H-1 pengingat persidangan melalui pesan whatsapp. Antrian Sidang terintegrasi dengan asisten virtual dan mengirim pesan whatsapp secara otomatis untuk memberikan pemberitahuan persidangan dengan cara, para pihak harus bersedia atau langganan informasi persidangan pada aplikasi Antrian Sidang Pengadilan.
6.	EKSTERNAL	APLIKASI BERPADU E-	

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2024

			Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.
7.	EKSTERNAL	PTSP ONLINE	 PTSP Online adalah Pelayanan Petugas Pelayanan Satu Pintu secara virtual yang terintegrasi dengan aplikasi Zoom Meeting dengan tautan yang tersedia. Layanan PTSP Online ini merupakan peningkatan layanan publik, untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat umum dan khususnya pencari keadilan untuk mendapatkan informasi layanan pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tanpa harus datang ke pengadilan, dengan tautan : https://us05web.zoom.us/j/3382443701?pwd=MHITbTE2RUp4RG1sMzMzNRYWVFODI3QT09#success

8.	EKSTERNAL	Mal Pelayanan Publik (MPP)	 Pengadilan Negeri Palangkaraya menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik dengan turut berpartisipasi di Mall Pelayanan Publik (MPP) Palangkaraya. Kegiatan ini bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan hukum, sejalan dengan upaya reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
9.	EKSTERNAL	Audio Anti Gratifikasi	 Aplikasi ini berfungsi untuk mengumumkan dan memberitahukan kepada pengunjung bahwa Pengadilan Negeri Palangkaraya anti gratifikasi.

10.	EKSTERNAL	PENGADILAN INKLUSIF (PELAYANAN UNTUK DISABILITAS)	  
-----	-----------	---	---

			  
--	--	--	---

		 Pengadilan Negeri Palangkaraya menuju pengadilan inklusif untuk penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Adapun sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Palangkaraya yaitu sebagai berikut:
--	--	---

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2024

11. INTERNAL APLIKASI SIPERMA

The image displays three screenshots of the SIPERMA application interface, which is used for managing vehicle documents and activities.

Screenshot 1: Admin Page | SIPERMA : Dokumen (Sertifikat/BPKB)

This screen shows a table of document entries. The table has columns for No, Jenis Dokumen, Nama Dokumen (BPKB/Sertifikat), Keterangan, File Upload (PDF), File Upload (Gambar), and Aksi.

No	Jenis Dokumen	Nama Dokumen (BPKB/Sertifikat)	Keterangan	File Upload (PDF)	File Upload (Gambar)	Aksi
1	BELUM BERSERTIFIKAT	BA Hibah TPK II, Seth Adj NO. 01	Hibah Pemkot Palangka Raya			
2	BELUM BERSERTIFIKAT	Sertifikat Tanah Tipkor II, Seth Adj no. 01	Sertifikat An. Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah Kantor Tipkor			
3	SERTIFIKAT	Sertifikat Diponegoro No. 21	Kantor PN Palangka Raya			
4	SERTIFIKAT	Sertifikat LUNTING S NO. 23	Rumah Dinas			
5	SERTIFIKAT	Sertifikat LUNTING S NO. 21	Rumah Dinas			
6	SERTIFIKAT	Sertifikat LUNTING S NO. 19	Rumah Dinas			
7	SERTIFIKAT	Sertifikat L. MANGKURAT NO 11	Rumah Dinas			
8	SERTIFIKAT	Sertifikat L. MANGKURAT 13	Rumah Dinas			

Screenshot 2: Admin Page | SIPERMA : Kegiatan

This screen shows a table of activity entries. The table has columns for No, Kegiatan, Batas Waktu, Rencana Aksi, Peringatan, Keterangan, Eviden, Foto, and Aksi.

No	Kegiatan	Batas Waktu	Rencana Aksi	Peringatan	Keterangan	Eviden	Foto	Aksi
1	Perpanjangan STNK Kendaraan Roda Dua KH 4388 AY	11-12-2021	15-11-2021	-	+ Katerangan			
2	Perpanjangan STNK Kendaraan Roda Dua KH 4388 AY	11-12-2021	15-11-2021	-	+ Katerangan			
3	Perpanjangan STNK Kendaraan Roda Dua KH 4557 AY	07-11-2021	15-10-2021	-	+ Katerangan			
4	Perpanjangan STNK Kendaraan Roda Dua KH 3902 AY	21-07-2021	28-06-2021	Selesai	sudah dilaksanakan perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas			
5	Perpanjangan STNK Kendaraan Roda Dua KH 3678 AY	18-02-2021	18-02-2021	Selesai	sudah Dilaksanakan Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas			
6	Perpanjangan STNK Kendaraan Roda Dua KH 3690 AY	18-02-2021	18-02-2021	Selesai	sudah Dilaksanakan Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas			
7	Perpanjangan STNK Kendaraan Roda Dua KH 3843 AY	05-01-2021	05-01-2021	Selesai	sudah Dilaksanakan Perpanjangan Pajak Kendaraan			

Screenshot 3: Login Page

The login page displays the following information:

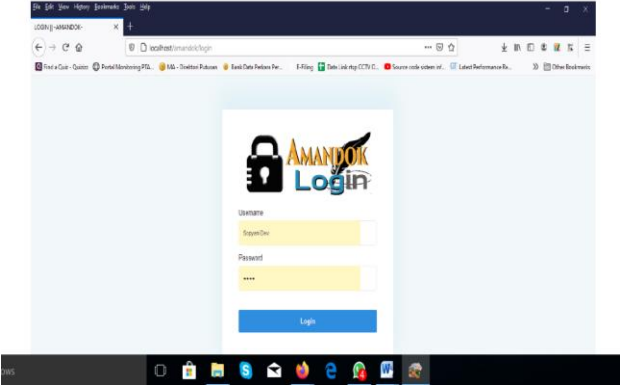
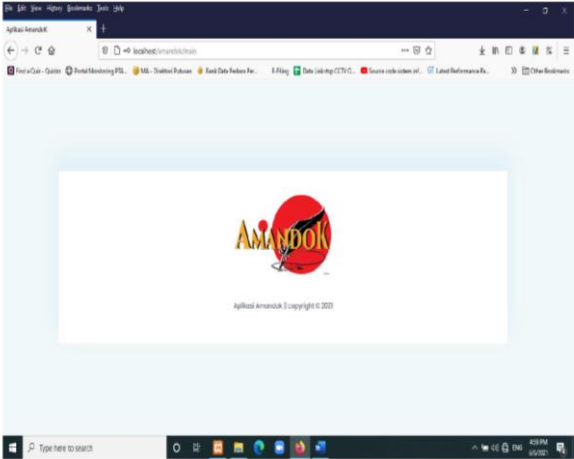
Selamat Datang **NOVA IRAINI, SE., M.Si.**, Anda Login Sebagai : **Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan**

Satuan Kerja : **Pengadilan Negeri Palangka Raya**

The page also features a decorative illustration of a modern office building and a police badge logo.

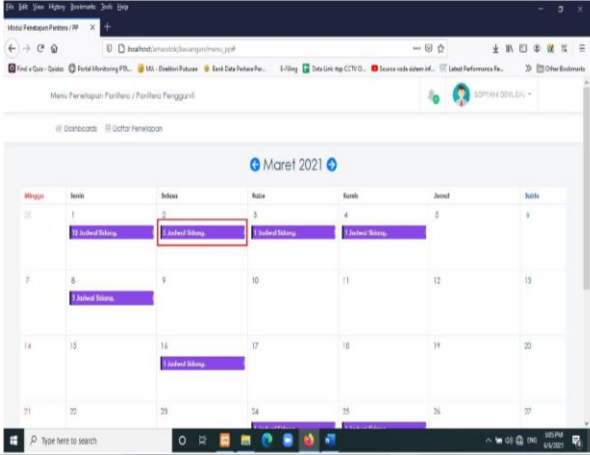
Aplikasi ini diperuntukan untuk reminder kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas dan untuk penyimpanan dokumen softcopy dari sertifikat agar dapat memudahkan pencarian dokumen sertifikat.

Aplikasi ini diperuntukan untuk reminder kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas dan untuk penyimpanan dokumen softcopy dari sertifikat agar dapat memudahkan pencarian dokumen sertifikat.

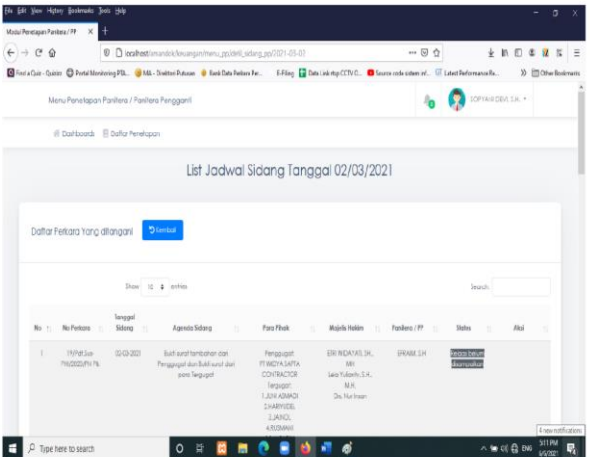
12.	INTERNAL	AMANDOK	LOGIN PANITERA PENGGANTI 1. Lakukan login untuk masuk aplikasi Amandok dengan user Panitera, Panmud atau PP yang telah terdaftar pada aplikasi SIPP. (192.168.1.3/amandok)  2. Setelah login dengan user Panitera, Panmud atau PP akan masuk pada main menu aplikasi Amandok, lalu klik logo aplikasi Amandok 
-----	----------	---------	---



2.a. Pada menu Penetapan Panitera, Panmud atau PP, klik jadwal sidang yang ada pada kalender sidang.



2.b. Lalu akan tampil List Jadwal Sidang berdasarkan tanggal sidang yang dipilih, selanjutnya pilih Aksi untuk tambahan penetapan.

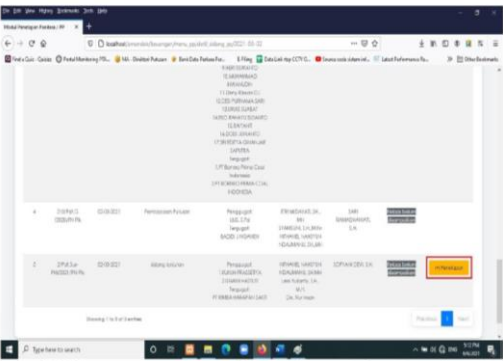
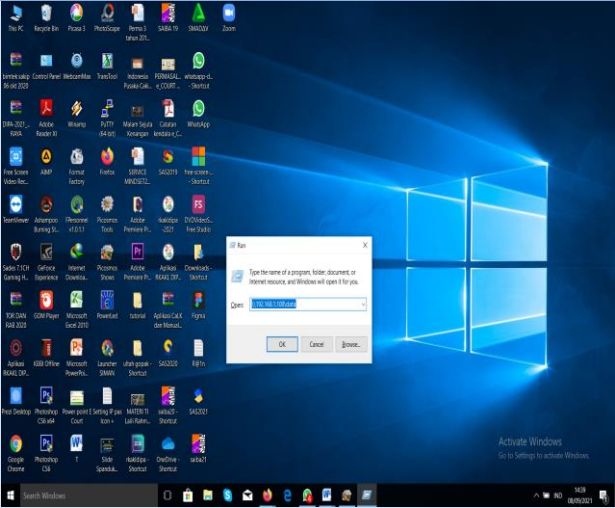


[PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA]

Hal. 73

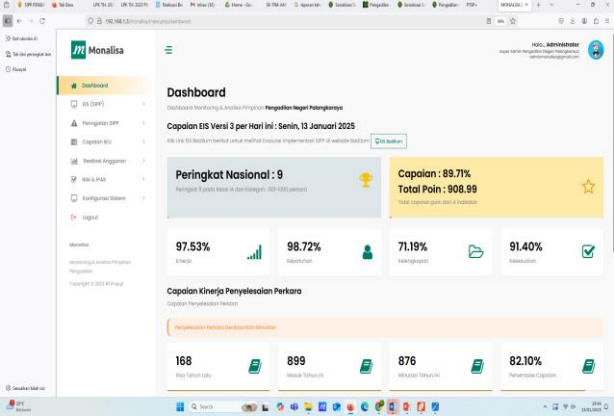
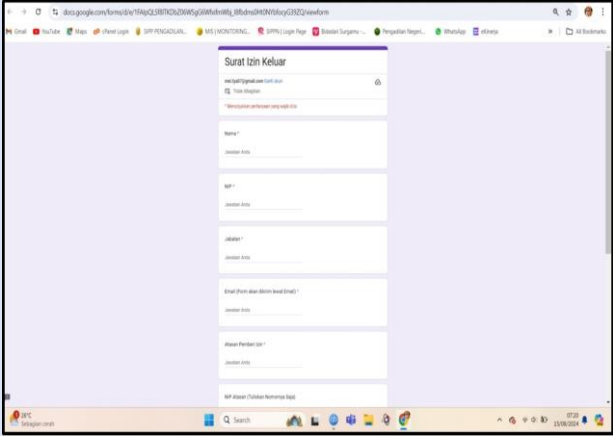
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2024

			 Note. Tombol (+) Penetapan hanya akan tampil berdasarkan user Panitera, Panmud atau PP yang login pada aplikasi Amandok Aplikasi ini dibuat untuk memberikan kemudahan kepada para pegawai terutama panitera pengganti dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga pekerjaan yang semula dilakukan secara manual dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan sistem digital. Aplikasi ini bertujuan untuk menimalisir keterlambatan penyerahan dokumen penetapan dari panitera pengganti ke bagian kepaniteraan pidana. Penggas aplikasi ini adalah Ibu Sofyani Devi, S.H. Panitera Pegganti / staf kepaniteraan perdata.
13.	INTERNAL	BANK DATA	

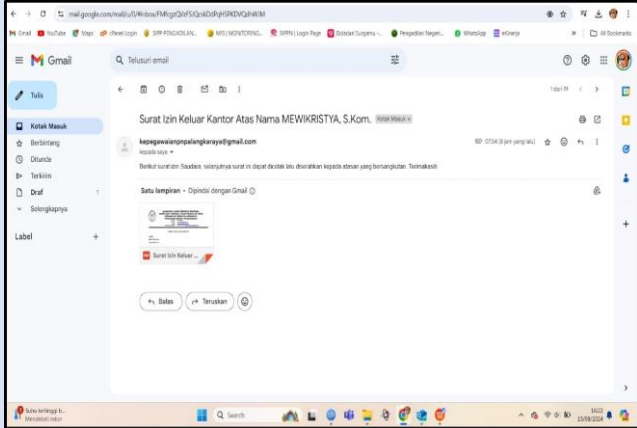
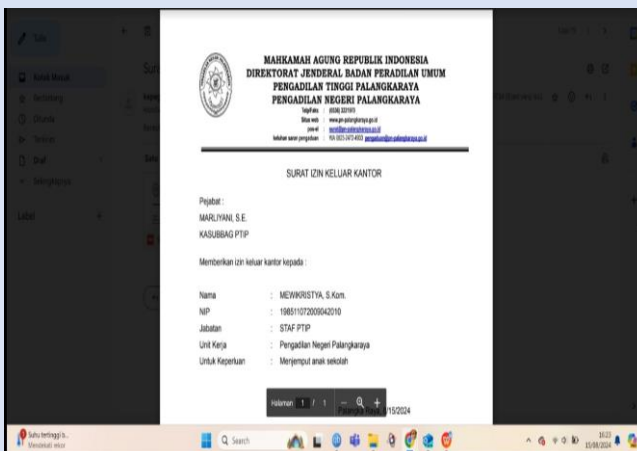
Aplikasi yang dibuat untuk memudahkan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mendapatkan data melalui aplikasi secara langsung dengan mengakses dibank data melalui link \\192.168.1.100\data. Aplikasi ini digagas oleh Bapak Yudi Eka Putra, S.H Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2024

			 MONALISA adalah Aplikasi Layanan Internal Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Pimpinan Pengadilan dalam memonitoring dan menganalisa kinerja pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan tautan : http://192.168.1.3/monalisa/index.php/auth Adapun fiturnya sebagai berikut nya : - EIS (SIPP) - Peringatan SIPP - Capaian IKU - Realisasi Anggaran - IKM dan IPAK - Konfigurasi Sistem
15.	INTERNAL	SURAT IJIN ONLINE	

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2024

		  Adalah surat izin keluar kantor secara online yang di isi melalui goggle form yang mana surat izin keluar tersebut akan masuk ke email pegawai yang bersangkutan dan bisa langsung dicetak sesuai dengan format yang berlaku sehingga lebih efektif dan efisien.
--	--	--

BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Adapun maksud, tujuan dan fungsi pengawasan berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 adalah sebagai berikut:

1. Maksud Pengawasan

- a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- d. Untuk menilai kinerja.

2. Tujuan Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung atau pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan

menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

3. Fungsi Pengawasan

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya berperkara yang murah.

Pada dasarnya pengawasan internal dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

a. *Pengawasan Melekat*

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pengawasan melekat telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas I A Nomor : 2/KPN.W16.U1/SK/HK.1.2.5/I/2024 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yaitu sebagai berikut:

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2024

HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

NO	PENGAWAS BIDANG	NAMA HAKIM PENGAWAS	DIBANTU OLEH
1.	WKPN SELAKU KOORDINATOR PENGAWASAN	MUHAMMAD RAMDES, S.H.	- PANITERA MUDA HUKUM - KASUB KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
2.	LAYANAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN	YUDI EKA PUTERA, S.H., M.H	RISKA FARAMITA
3.	LAYANAN SIPP	YUDI EKA PUTERA, S.H., M.H	GUSTAV DENO VAN
4.	LAYANAN MEDIASI	YUDI EKA PUTERA, S.H., M.H	IRMAYANI ROULINA SIMANJORANG, A.Md.
5.	LAYANAN DIVERSI	YUDI EKA PUTERA, S.H., M.H	KASPUL ANWAR
6.	LAYANAN KEADILAN RESTORATIF	MUHAMMAD AFFAN, S.H., M.H	RISWAN ADI PUTERA, S.H
7.	LAYANAN KEPANITERAAN PERDATA	SRI HASNAWATI, S.H.,M.H.	IRMAYANI ROULINA SIMANJORANG, A.Md.
8.	LAYANAN EKSEKUSI, KONSINYASI DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN	SRI HASNAWATI, S.H.,M.H.	AGAVE CRISTY SARAGIH
9.	LAYANAN PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN DELEGASI	SRI HASNAWATI, S.H.,M.H.	WAJIDIN
10.	LAYANAN KEPANIERAAN PIDANA	MUHAMMAD AFFAN,S.H.,M.H	KRISTINA MELATI PASARIBU, S.H
11.	KIMWASMAT NARAPIDANA	MUHAMMAD AFFAN,S.H.,M.H	KRISTINA MELATI PASARIBU, S.H
12.	LAYANAN E-BERPADU	MUHAMMAD AFFAN,S.H.,M.H	KRISTINA MELATI PASARIBU, S.H.
13.	LAYANAN SPPT-TI	MUHAMMAD AFFAN,S.H.,M.H	IKA MURTIANINGSIH, S.H.
14.	LAYANAN KEPANITERAAN KHUSUS TIPIKOR	KUSMAT TIRTA ASMITA, S.H.	SALUNDIK, S.H.
15.	LAYANAN KEPANITERAAN KHUSUS PHI	MUHAMAD SUHRI BURHAN, S.H, M.H.	SARI RAMADHANIATI, S.H.
16.	LAYANAN KEPANITERAAN HUKUM	HOTMA EDISON PARLINDUNGAN SIPAHUTAR, S.H., M.H	JEJEN JAENI

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2024

17.	LAYANAN PENGADUAN DAN RESPON KELUHAN/KETIDAKPUASAN	ERNI KUSUMAWATI, S.H, M.H.	JUMIATI, S.H.
18.	LAYANAN AKSES Keadilan	MUJI KARTIKA RAHAYU, S.H., M.Fil.	LIANOVA, S.H.
19.	LAYANAN INFORMASI	AMIR MAHMUD MUNTHE, S.H.,M.H.	MANDES, S.Kom.
20.	LAYANAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI	HOTMA EDISON PARLINDUNGAN SIPAHUTAR, S.H., M.H	RISKA FARAMITHA
21.	LAYANAN DUKUNGAN SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI, DAN PELAPORAN	SUMARYONO, S.H.,M.H.	MEWIKRISTYA,S.Kom.
22.	LAYANAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA	ERNI KUSUMAWATI, S.H, M.H.	YOYO
23.	LAYANAN UMUM DAN KEUANGAN	BENDHAR M.L. TORUAN, SH,.M.H.	PUTRI PRA YANA TARIGAN, A.Md
24.	LAYANAN PERPUSTAKAAN	LELA YULIANTY, S.H.,M.H	LAILA HAYATI, A.Md.
25.	LAYANAN PTSP/E-COURT	1. ERHAMMUDIN, S.H.,M.H. 2. Drs. NUR INSAN	GUSTAV DENO VAN
26.	LAYANAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA PENGADILAN RAMAH ANAK	IIS SITI ROCHMAN, S.H.,M.H.	GUSTI NORLIANI
27.	LAYANAN DUKUNGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS	MUHAMMAD SUHRI BURHAN, S.H.,M.H.	BERNI MATHEUS
28.	LAYANAN PUBLIK	DARYONO ABADI, S.H.,M.H.	JEJEN JAENI
29.	LAYANAN HUMAS/JURUBICARA	1. HOTMA EDISON PARLINDUNGAN SIPAHUTAR, S.H., M.H 2. YUDI EKA PUTRA, S.H.,M.H. 3. AMIR MAHMUD MUNTHE, S.H.,M.H.	DEAN BARIZKA
30.	LAYANAN KEPROTOKOLAN	YUDI EKA PUTERA, S.H., M.H	TIMOTIUS AGNI ANGGA KUSUMA
31.	LAYANAN PENGAMANAN DALAM	YUDI EKA PUTERA, S.H., M.H	ABDUL KAHAR MASHURI

Hakim-hakim Pengawas Bidang tersebut secara periodik selama 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan hasil pengawasan bidang masing-masing kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Sedangkan pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tahun 2024 telah dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu sebagai berikut:

1. Reguler I pada tanggal 6-7 Mei 2024 berdasarkan surat Tugas Nomor 725/KPT.W16-U/ST.KP7.1/V/2024;
2. Reguler II pada tanggal 21-22 November 2024 berdasarkan surat Tugas Nomor 2874/KPT.W16-U/ST.KP7.1/XI/2024.

b. *Pengawasan Fungsional*

Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. EVALUASI

Evaluasi merupakan suatu proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi.

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya secara rutin melakukan evaluasi kinerja terhadap aparaturnya melalui briefing atau rapat bulanan yang selalu dilaksanakan setiap bulannya. Rapat bulanan selain untuk evaluasi kinerja, juga difungsikan sebagai wadah untuk membahas segala hambatan dalam pelaksanaan tugas serta juga bertujuan untuk membangun kebersamaan antar keluarga besar Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Dari Evaluasi Pengawasan tersebut nantinya dapat dirumuskan solusi dan kebijakan yang akan diambil guna menyelesaikan kendala dan hambatan yang ada. Sehingga pekerjaan dapat dikerjakan tepat waktu, tertib dan lancar sesuai dengan hasil yang diharapkan.

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan guna memberikan peningkatan pelayanan bagi masyarakat para pencari keadilan.
2. Sangat disadari bahwa peningkatan kualitas pelayanan peradilan tersebut belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan, namun setidaknya upaya ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Pengadilan Negeri Palangkaraya.
3. Menganalisis Kinerja Pengadilan Negeri Palangkaraya merupakan suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Palangkaraya dari masa ke masa sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan dalam peningkatan kinerja.
4. Bagi Pengadilan Negeri Palangkaraya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2024 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi pada masa-masa mendatang.

B. REKOMENDASI

1. Perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan baik Teknis maupun Non Teknis agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan lancar dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

2. Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan Sumber Daya Manusia untuk peningkatan pencapaian target pelayanan publik yang prima dan berbasis IT (Informasi Teknologi).
3. Perlu adanya penambahan personil pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, baik itu Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, maupun staf mengingat Sumber Daya Manusia yang dimiliki saat ini masih terbatas.